



USAID | **INDONESIA**
DARI RAKYAT AMERIKA

Investasi Pembangunan di Indonesia:

Indonesia Yang Lebih Kokoh dalam Memajukan Pembangunan Nasional Dan Global

Strategi Kerjasama Pembangunan Indonesia - Amerika Serikat
2014 – 2018



Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat
Strategi Kerjasama Pembangunan Indonesia - Amerika
Oktober 2013

Foto halaman depan: Siswa jurusan biologi di kampus modern Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia. USAID memberikan dukungan dana untuk membangun dan melengkapi melengkapi fasilitas pendidikan yang akan meningkatkan jumlah guru terlatih di provinsi Aceh.

Fotografer: Danumurthi Mahendra, USAID/Indonesia

Investasi Pembangunan USAID di Indonesia

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	V
SINGKATAN DAN AKRONIM.....	IX
KONTEKS PEMBANGUNAN, TANTANGAN, DAN PELUANG	9
“SATU SISI INDONESIA”: KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN LINGKUNGAN	
INDONESIA YANG SEMAKIN MAJU	
KEMITRAAN AS - INDONESIA	
FOKUS	
DAERAH SASARAN MENURUT LOKASI GEOGRAFIS	
HIPOTESIS PEMBANGUNAN	
TUJUAN KERJASAMA PEMBANGUNAN 1: TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS LEBIH KUAT	15
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.1: KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI AKUNTABILITAS MENINGKAT	
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.2: PARTISIPASI MASYARAKAT MENINGKAT	
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.3: PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DIPROMOSIKAN	
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.4: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN/KOTA SASARAN DI WILAYAH TIMUR INDONESIA MENINGKAT	
TUJUAN KERJASAMA PEMBANGUNAN 2: PELAYANAN DASAR UMUM UNTUK KELOMPOK PALING MISKIN DAN RENTAN MENINGKAT	25
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 2.1: PELAYANAN UNTUK MENURUNKAN KEMATIAN KARENA PENYEBAB YANG DAPAT DICEGAH TERUTAMA DI ANTARA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK MENINGKAT	
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 2.2: KUALITAS, RELEVANSI, DAN AKSES TERHADAP SUB-SEKTOR PENDIDIKAN SASARAN MENINGKAT	
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 2.3: TATA KELOLA PELAYANAN ESENSIAL DI DAERAH DIPERKUAT	
TUJUAN KERJASAMA PEMBANGUNAN 3: PRIORITAS PEMBANGUNAN GLOBAL YANG MENJADI KEPENTINGAN BERSAMA MENINGKAT	32
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 3.1: PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR PENTING DI TINGKAT REGIONAL DAN GLOBAL MENINGKAT	
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 3.2: KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DAN DARAT SEMAKIN LESTARI	
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 3.3: MENURUNNYA RISIKO DAN MENINGKATNYA KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM UNTUK Mendukung EKONOMI Hijau	
HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 3.4: KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR PEMERINTAH INDONESIA LEBIH KUAT	
TUJUAN KERJASAMA PEMBANGUNAN 4: PENCAPAIAN KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INOVASI MENINGKAT	42

HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 4.1: KAPASITAS AKADEMIS DAN PENELITIAN ILMIAH MENINGKAT

HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 4.2: PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN DATA MENINGKAT

HASIL ANTARA KERJASAMA PEMBANGUNAN 4.3: PENDEKATAN PEMBANGUNAN INOVATIF DILAKSANAKAN

ASUMSI PEMIKIRAN KRITIS DAN RISIKO	50
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBELAJARAN	52
KERANGKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI USAID	53
LAMPIRAN 1: REFERENSI.....	55
LAMPIRAN 2: DAERAH SASARAN MENURUT LETAK GEOGRAFIS.....	58

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (*United States Agency for International Development/USAID*) merupakan lembaga Pemerintah AS yang membantu berbagai upaya pencapaian prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama bagi Indonesia dan Amerika Serikat. Strategi Kerjasama Pembangunan Indonesia - Amerika Serikat (*Country Development Cooperation Strategy/CDCS*) ini memuat garis besar kerjasama pembangunan AS di Indonesia untuk lima tahun yang akan datang dengan konteks konsolidasi demokrasi, ekonomi yang terus tumbuh, meningkatnya peran kepemimpinan Indonesia di tingkat global dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi Indonesia. Dengan jumlah penduduk 240 juta orang dan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1 triliun dollar AS, Indonesia merupakan mitra ekonomi utama bagi AS. Di sisi lain, 40 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar internasional yaitu berpenghasilan di bawah 1,25 dollar AS per hari (Bank Dunia, 2013). Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia, penghasil emisi karbon ketiga terbesar di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati kedua tertinggi di dunia. Keberhasilan Indonesia sangat penting bagi Amerika Serikat. Kegiatan dalam CDCS ini mendukung Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia, yang ditandatangani oleh Presiden Obama dan Yudhoyono pada tahun 2010 untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

Indonesia telah mengalami transformasi yang luar biasa selama 50 tahun terakhir. Pada masa awal USAID melakukan kegiatannya, Indonesia mengalami kemiskinan yang meluas, pemerintahan yang otoriter, infrastruktur yang minim dan tantangan lain yang membatasi peluang bagi rakyat untuk maju. Saat ini, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, demokrasi yang dinamis, negara terkemuka dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan anggota dari G-20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan tahunan sebesar hampir 6 persen dalam lima tahun terakhir (SEADI 2013), akan tetapi angka tersebut belum dapat menghapuskan kemiskinan.

Perubahan Hubungan Kemitraan AS dan Indonesia

Saat membahas permintaan bantuan dari Indonesia, hasil konsultasi selama penyusunan CDCS menunjukkan bahwa bentuk bantuan yang diperlukan bukan berupa dana. Indonesia mencari bantuan teknis, pengembangan kapasitas, teknologi dan ide-ide yang mendorong inovasi dan reformasi. Hari-hari di mana posisi USAID sebagai donor sudah berlalu. AS merupakan mitra dan *co-investor* pembangunan bagi Indonesia.

Kemajuan demokrasi dan ekonomi selama 15 tahun terakhir telah menjadikan Indonesia muncul sebagai pemimpin terkemuka di tingkat regional dan menyuarakan kepentingan global. Tantangan pembangunan Indonesia melampaui batas-batas nusantara dan berdampak di tingkat regional dan global, terutama di bidang lingkungan dan kesehatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah melampaui 6 persen dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelompok miskin dan paling rentan mencakup hampir setengah dari jumlah penduduk - masih berpenghasilan kurang dari 2 dollar per hari. Desentralisasi pemerintahan, yang secara umum menunjukkan perkembangan demokrasi yang positif, belum meningkatkan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar untuk seluruh masyarakat di wilayah nusantara. Indonesia terus berjuang memperkuat lembaga pemerintahan yang masih rapuh, memerangi korupsi endemik, dan rendahnya toleransi dimana semua hal tersebut merupakan prioritas untuk kemitraan kedua negara. Posisi Indonesia semakin diakui di tingkat dunia dan pengaruhnya semakin meningkat, tetapi manfaat demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya

terwujud di Indonesia. Sesuai visi Presiden Obama tentang kerjasama dengan komunitas internasional untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dalam dua dekade ke depan, Indonesia akan terus menjadi mitra utama dalam mencapai tujuan tersebut. CDCS memberikan arah keterlibatan strategis USAID di Indonesia dan oleh karena itu memberikan peluang untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan cara yang dapat mendukung visi Presiden Obama dan sesuai dengan konteks kemitraan USAID di Indonesia.

Keterlibatan Strategis USAID

Tujuan utama dari strategi ini ***Menuju Indonesia yang lebih kokoh dalam memajukan pembangunan nasional dan global*** mencerminkan upaya bersama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia dan memanfaatkan peluang pembangunan di luar Indonesia. Investasi USAID untuk lima tahun ke depan akan berfokus pada empat Tujuan Kerjasama Pembangunan (*Development Objectives/DO*):

1. Tata kelola pemerintahan yang demokratis diperkuat
2. Pelayanan dasar umum untuk kelompok paling miskin dan rentan meningkat
3. Prioritas pembangunan global yang menjadi kepentingan bersama meningkat
4. Kerjasama ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi meningkat

Dua Tujuan Kerjasama Pembangunan yang pertama berfokus pada permasalahan pembangunan di Indonesia, dan dua lainnya lebih ke arah luar Indonesia, termasuk kerja sama dengan Indonesia di negara lain. Secara keseluruhan dalam strategi CDCS, USAID akan menjadi *co-investor* bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan sektor swasta di Indonesia. USAID akan membangun hubungan yang erat dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan sektor swasta, dan bekerja sama dengan berbagai lembaga di lingkungan Kedutaan Besar AS, untuk mempromosikan Indonesia yang demokratis dan maju.

SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	<i>Asian Development Bank</i> ; Bank Pembangunan Asia	GBV	<i>Gender-based Violence</i> ; kekerasan berbasis gender
AIPI	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	GCC	<i>Global Climate Change</i> ; Perubahan Iklim Global
AKI	Angka Kematian Ibu	GF (GFATM)	<i>Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria</i> ; Global Fund untuk memerangi AIDS, Tuberculosis (TB) dan Malaria
APEC	<i>Asian-Pacific Economic Cooperation</i> ; Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik	GHI	<i>Global Health Initiative</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> ; Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara	GIS	<i>Geographic Information Systems</i> ;
AusAID	<i>Australian Agency for International Development</i> ; Lembaga Bantuan Pembangunan Internasional Australia	GRIFN	<i>Global Research and Innovation Fellowship Network</i> ; Jaringan <i>Fellowship</i> untuk Kerjasama Riset dan Inovasi Tingkat Global
BAKN	Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	HAM	Hak Asasi Manusia
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	HELM	<i>Higher Education Leadership and Management</i> ; program USAID di bidang pendidikan tinggi
BNPBB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	HIV/AIDS	<i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> ; virus penyebab menurunnya sistem kekebalan tubuh
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	ICASS	<i>International Cooperative Administrative Support Services</i> ; Sistem Pendukung Administrasi Untuk Kerjasama Internasional
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	INCLE	<i>International Narcotics Control and Law Enforcement</i> ; Badan Internasional Pemerintah AS untuk Pengendalian Narkotika dan Penegakan Hukum
BRIC	Brazil, Russia, India dan China	IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
CDCS	<i>Country Development Cooperation Strategy</i> ; Strategi Kerjasama Pembangunan Indonesia - Amerika Serikat	IR	<i>Intermediate Results</i> ; Hasil antara Kerjasama Pembangunan
CIDA	<i>Canadian International Development Agency</i> ; Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kanada	Irjen	Inspektorat Jenderal
DIKTI	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	ISF	<i>Indonesian Science Fund</i>
DO	<i>Development Objective</i> ; Tujuan Kerjasama Pembangunan	IUCN	International Union for Conservation of Nature
DoD	<i>Department of Defense</i> ; Departemen Pertahanan AS	JICA	<i>Japanese International Cooperation Agency</i> ; Badan Kerjasama Internasional Jepang
DOJ	<i>Department of Justice</i> ; Departemen Kehakiman AS	KADIN	Kamar Dagang dan Industri
DRG	<i>Democracy, Human Rights, and Governance</i> ; demokrasi, HAM dan tata kelola pemerintahan	Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DRN	Dewan Riset Nasional	Kemenag	Kementerian Agama
EC-LEDS	<i>Enhancing Capacity in Low Emissions Development Strategies</i> ; Meningkatkan Kapasitas Strategi Pembangunan Rendah Emisi	Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
EU	<i>European Union</i> ; Uni Eropa	Kemenhut	Kementerian Kehutanan
FAF	<i>Foreign Assistance Framework</i> ; kerangka bantuan luar negeri	Kemenkes	Kementerian Kesehatan
FY	<i>Fiscal Year</i> ; Tahun Anggaran	KIA	Kesehatan Ibu dan Anak
FSN	<i>Foreign Service National</i> ; staf lokal Indonesia	KIN	Komite Inovasi Nasional
		KIP	Komisi Informasi Pusat

KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi	PDB	Produk Domestik Bruto
LF	lymphatic filariasis	PEER	<i>Partnerships for Enhanced Engagement in Research</i>
LGBT	<i>Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender</i> ; lesbian, gay, biseksual, waria	Pemilu	Pemilihan Umum
Litbang	Penelitian dan Pengembangan	PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
LSL	Lelaki suka lelaki	POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat	PPP	<i>Public-Private Partnership</i> ; Kemitraan Pemerintah - Swasta
M&E	Monitoring dan Evaluasi	Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
MCC	<i>Millennium Challenge Corporation</i> ; Badan independen pemerintah Amerika Serikat untuk bantuan luar negeri	REDD	<i>Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
MDGs	<i>Millennium Developmental Goals</i> ; Tujuan Pembangunan Milenium	RF	<i>Result Framework</i> ; Kerangka Hasil
MDR TB	<i>Multi-Drug Resistant TB</i> ; Tuberkulosis yang resisten terhadap obat ganda anti TB	RISTEK	Kementerian Riset dan Teknologi
MenkoKesra	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	SD	Sekolah Dasar
MP3EI	<i>Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development</i> ; Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
NTD	<i>Neglected Tropical Diseases</i>	SMS	<i>Short Message Services</i> ; pesan singkat melalui telepon genggam
ODA	<i>Overseas Development Assistance</i>	SSTC	<i>South-South and Triangular Cooperation</i> ; Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
ODHACA	<i>Overseas Humanitarian, Disaster Assistance, and Civic Aid</i>	TA	<i>Technical Assistance</i> ; Bantuan Teknis
ODC/USARPAC	<i>Office of Defense Cooperation / U.S. Army Pacific Command</i>	TB	Tuberculosis
OE	<i>Operating Expenses</i> ; Biaya Operasional	UHC	<i>Universal Health Coverage</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>	UNDP	<i>United Nations Development Program</i>
OFDA	<i>Office of U.S. Foreign Disaster Assistance</i> ;	UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil	UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
ORI	Ombudsman Republik Indonesia	UP	<i>University Partnerships</i> ; Kemitraan Universitas
PASA	<i>Participating Agency Service Agreement</i>	USAID	<i>United States Agency for International Development</i> ; Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat
		USDH	<i>U.S. Direct Hire</i>
		WASH	<i>Water, Sanitation, and Hygiene</i> ; air, sanitasi dan higiene
		WGI	<i>Worldwide Governance Indicators</i>
		WHO	<i>World Health Organization</i> ; Badan Kesehatan Dunia

KONTEKS PEMBANGUNAN, TANTANGAN, DAN PELUANG

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk terpadat di dunia dan 240 juta penduduknya mayoritas beragama Islam. Penduduknya sangat beragam dan menggunakan ratusan bahasa. Wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri atas 17.000 pulau yang dibagi menjadi tiga zona waktu. Setelah mengalami transformasi demokratis yang luar biasa dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama dua dekade terakhir, Indonesia muncul sebagai negara terkemuka di tingkat regional dan global. Akan tetapi Indonesia masih berjuang untuk memperkuat lembaga pemerintahan yang rapuh, mengatasi korupsi endemik, terorisme, dan meningkatnya intoleransi agama dan etnis. Kasus kekerasan berbasis agama naik dari 299 pada tahun 2011 menjadi 371 di tahun 2012 (Aritonang, 2012). Dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia dan emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga, Indonesia merupakan negara adidaya untuk bidang lingkungan di tingkat global. Meskipun ekonomi tumbuh lebih dari 6 persen per tahun (Bank Dunia, 2013a) dan siap untuk masuk ke dalam 10 ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa dekade mendatang (Oberman et al, 2012), kesenjangan pendapatan meningkat: 20 persen kelompok terkaya menguasai 80 persen kekayaan dan hampir setengah jumlah penduduk Indonesia hidup dengan kurang dari 2 dollar AS per hari (World Bank, 2013a). Dalam "dua sisi Indonesia", di satu sisi negara ini merupakan negara yang semakin berpengaruh di tingkat global, dan di sisi yang lain belum sepenuhnya menyadari manfaat positif dari demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Satu Sisi Indonesia”: Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan

Di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Kualitas pelayanan kesehatan masih tertinggal dan tingkat penyakit menular tetap tinggi. Tuberkulosis (TB) menyebabkan kematian pada sekitar 65.000 orang Indonesia per tahun (WHO, 2013). Angka kematian ibu di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara dan Indonesia tidak dapat mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) untuk kesehatan ibu dan anak. Akses terhadap pendidikan tinggi menunjukkan kesenjangan yang signifikan jika dikaji berdasarkan tingkat pendapatan; akses terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama seperti Cina, Malaysia, dan Thailand (Bank Dunia, 2012a). Ketidaksetaraan gender masih terus ada dan perempuan terus menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan. Perempuan cenderung memiliki pekerjaan yang tidak memberikan jaminan keamanan dibandingkan dengan pekerjaan yang dimiliki laki-laki; perempuan mendapatkan manfaat sosial yang lebih sedikit, memiliki aset ekonomi lebih sedikit, dan belum berpartisipasi penuh dalam menempati posisi kepemimpinan di sektor pemerintah dan swasta. Degradasi lingkungan yang cepat dan bencana alam yang sering terjadi menempatkan Indonesia sebagai negara berisiko tinggi terkena dampak perubahan iklim. Deforestasi menghasilkan 80 persen dari emisi karbon Indonesia per tahun, dan menempatkannya di antara penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi dunia. Indonesia rentan terhadap tekanan berat terkait iklim seperti banjir, kebakaran, kekeringan, dan badai, yang merupakan 80 persen dari kejadian bencana alam. Bank Pembangunan Asia memperkirakan bahwa dampak perubahan iklim mengambil sekitar 2,5 - 7 persen dari PDB pada tahun 2100 (2011)

Indonesia Yang Semakin Maju

Indonesia berupaya mengatasi tantangan dalam negeri dan pada saat yang sama memainkan peran penting di panggung pembangunan dunia. Selain menjadi anggota G-20, Indonesia adalah ketua Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tahun 2013, ketua Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (GF), dan salah satu ketua panel tingkat tinggi untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015. Di

ketiga forum tersebut maupun forum internasional lainnya, Indonesia berhasil mengembangkan diri sebagai negara terkemuka dalam mengatasi tantangan pembangunan global yang mempengaruhi kemakmuran dalam negerinya. Sebagai kekuatan ekonomi ke-16 terbesar di dunia, Indonesia semakin penting sebagai mitra AS. Pengamat memperkirakan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi mitra terbesar ketujuh pada tahun 2030 (Oberman et al, 2012). Bahkan, Indonesia saat ini sudah mulai meningkatkan bantuan kepada negara lain. Secara spesifik tujuan tersebut dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) sebagai tujuan utama Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, adil, dan makmur tahun 2025. Selain itu, Indonesia ingin mencapai "daya saing ekonomi dari sumber daya alam terus meningkat, sumber daya manusia yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi" pada tahun 2020 (BAPPENAS, 2007, hal. 33). Investasi USAID di Indonesia akan semakin melengkapi kepemimpinan Indonesia yang semakin berkembang dalam mengatasi tantangan pembangunan global.

Kemitraan AS - Indonesia

Hubungan kemitraan antara AS dengan Indonesia mengalami perubahan sejalan dengan transformasi pembangunan Indonesia. Investasi Pemerintah AS sangat penting untuk membantu Indonesia mengatasi kesenjangan pembangunan yang serius dan sudah lama ada. Saat ini Indonesia telah menunjukkan diri sebagai negara yang memiliki tanggung jawab dan kredibilitas dalam mengatasi berbagai permasalahan penting di tingkat regional dan global. Oleh karena itu, CDCS ini merupakan pendekatan yang menggabungkan fokus investasi pembangunan ke dalam maupun ke luar Indonesia.

Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia, yang merupakan komitmen jangka panjang Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono untuk memperluas, memperdalam, dan meningkatkan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia, merupakan bentuk pengakuan AS terhadap keberhasilan Indonesia. Kerjasama di bawah Kemitraan Komprehensif diuraikan dalam Rencana Aksi yang terdiri dari tiga pilar: politik dan keamanan; ekonomi dan pembangunan; serta kerjasama sosial-budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemitraan ini mengakui pentingnya peningkatan kerjasama global, terbukanya peluang besar untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, serta pentingnya memupuk rasa saling pengertian dan komunikasi antara dua negara yang memiliki keberagaman penduduk paling tinggi di dunia. Kemitraan ini memiliki agenda yang dinamis dengan cakupan yang luas untuk peningkatan kerjasama.

Fokus

Sebagai persiapan dalam penyusunan strategi ini, konsultasi dilakukan di berbagai tempat di seluruh nusantara melibatkan lebih dari seribu orang tokoh yang berasal dari kalangan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan sektor swasta, serta mempertimbangkan berbagai kajian yang pernah dilakukan. Konsultasi kami menunjukkan beberapa faktor penting: (1) secara luas pendidikan dasar tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan penting investasi pembangunan AS di Indonesia, (2) dampak dengan skala transformasional pada pertumbuhan di bidang pertanian dan ekonomi tidak memungkinkan dicapai jika mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kedua sektor tersebut juga tidak dianggap sebagai prioritas tinggi dalam keterlibatan USAID dengan Pemerintah Indonesia, kecuali di bidang kelestarian lingkungan, dan (3) investasi dalam penguatan pemilu, legislatif dan partai politik partai bukan merupakan bidang kritis setelah pemilu 2014. Oleh karena itu, USAID tidak lagi mendalami minat untuk menangani bidang-bidang seperti pendidikan dasar, pertanian, kebijakan ekonomi, DPR, partai politik, dan pemilihan umum (setelah tahun 2014); dan beralih ke bidang baru seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, dan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia mengenai beberapa kepentingan regional/global tertentu, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

Kajian dan konsultasi kami dengan para pemangku kepentingan dan pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa bantuan teknis dan peningkatan kapasitas dari USAID sangat diminati dan semakin diminati terutama di tingkat daerah. Strategi yang mengintegrasikan empat Tujuan Kerjasama Pembangunan (DO) memanfaatkan pengalaman dan hubungan dengan para pemangku kepentingan di daerah, di mana USAID secara efektif melengkapi kegiatan yang telah dihasilkan oleh mitra internasional lainnya, dan di mana keuntungan komparatif tersebut akan memberikan dampak. USAID menekankan kemitraan yang setara dalam semua kerjasama dengan Indonesia, dan pada saat yang sama USAID akan meningkatkan upaya untuk melakukan pendanaan bersama dengan Pemerintah Indonesia. USAID juga memiliki keunggulan kompetitif yaitu kemampuan untuk bermitra dengan sektor swasta dan donor lainnya, yang dapat meningkatkan sumber daya dan menghasilkan dampak yang lebih cepat. USAID akan mencari lebih banyak cara inovatif untuk memanfaatkan sumber daya dan ide-ide dari sektor swasta untuk mencari solusi dalam mengatasi tantangan pembangunan. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana USAID merencanakan, merancang, memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan program-program di masa yang akan datang.

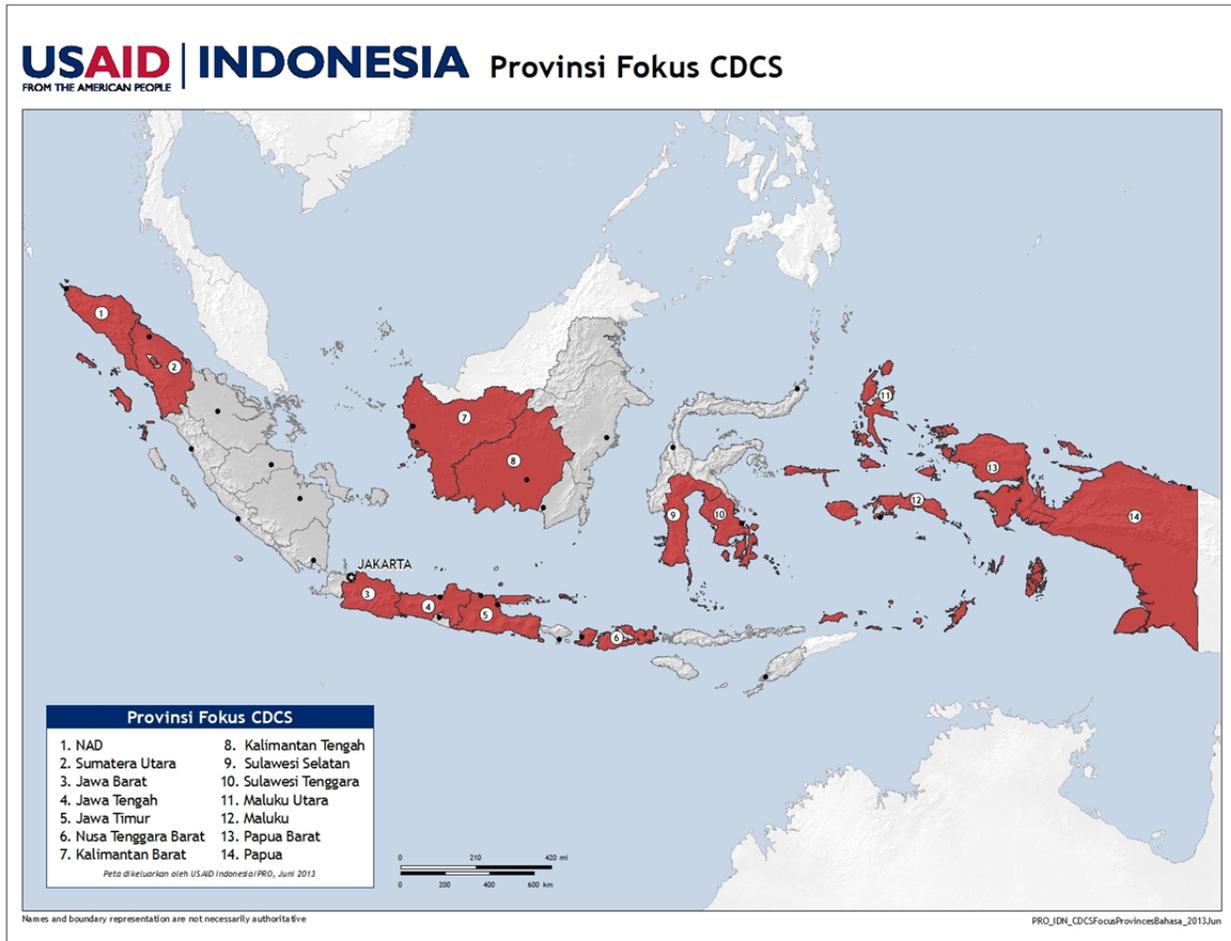
USAID/Indonesia juga akan semakin mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di seluruh portofolio kami. Data di Indonesia mengenai status perempuan dan anak perempuan tidak dipilah. Menurut laporan OECD tahun 2012 tentang Lembaga Sosial dan Indeks Gender, Indonesia menempati urutan ke-32 dari 86 negara dalam penanganan lembaga sosial yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan. Ini merupakan peningkatan dari tahun 2009 ketika Indonesia menempati peringkat ke-55 dari 102 negara. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (tapi belum meratifikasi Protokol Opsional), dan telah menyatakan komitmennya untuk mengejar ketertinggalan dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dalam berbagai rencana nasional. Tetapi dalam pelaksanaannya rencana tersebut kekurangan sumber daya. Terjadi peningkatan jumlah peraturan daerah di Indonesia yang secara langsung mendiskriminasi perempuan, terutama kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat. Selanjutnya, kekerasan berbasis gender terus menjadi masalah yang meluas. Bukti adanya intoleransi yang semakin tinggi terhadap minoritas baik etnis maupun agama, dan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan waria (LGBT) juga menjadi kekhawatiran (Ja dkk., 2012). USAID akan terus memperluas pengetahuan mengenai diskriminasi berbasis gender dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya dan mengatasinya melalui investasi yang tepat sasaran.

Menentukan Sasaran Menurut Lokasi Geografis

Dalam rangka lebih selektif dan fokus sesuai rangkaian reformasi yang tercantum dalam Kerangka Kebijakan USAID untuk 2011-2015 dan USAID *Forward*, USAID/Indonesia menerapkan analisis geografis secara seksama untuk menetapkan target Strategi Tahun Anggaran (FY) 2014-2018 (lihat juga Lampiran 2). Wilayah geografis yang menjadi fokus USAID/ Indonesia untuk strategi ini kurang dari setengah dibandingkan dengan strategi sebelumnya. USAID akan memusatkan kegiatan di sejumlah provinsi tertentu dimana sumber daya USAID diharapkan dapat menghasilkan dampak terukur yang paling besar di berbagai sektor kunci yang secara keseluruhan akan mendukung terbentuknya stabilitas dan kemakmuran Indonesia.

Penggunaan analisis data dan peta secara geografis memungkinkan pengumpulan informasi terfokus di tingkat lokal. Beberapa kriteria umum berdasarkan analisis muncul sebagai faktor kunci untuk menentukan fokus strategi pada sektor-sektor tertentu dan kelompok penduduk di daerah geografis tertentu. Kriteria ini meliputi: prioritas pembangunan, komitmen pemerintah daerah dan kemauan politik, luasnya dampak yang mungkin terjadi, kegiatan donor lain, pengalaman sebelumnya dan

hubungan yang sudah ada, peluang koordinasi antar sektor, kemampuan untuk melakukan investasi bersama dengan sektor swasta, kepadatan penduduk (dengan fokus pada kelompok paling miskin dan rentan), bencana dan kerentanan/mitigasi perubahan iklim, serta keanekaragaman hayati. Sebagai hasilnya, USAID menetapkan 14 provinsi sebagai fokus wilayah prioritas. Meskipun setiap tema DO diintegrasikan ke dalam analisis, penentuan sasaran geografis terutama berdasarkan pada pertimbangan kondisi sektor kesehatan dan lingkungan. Kegiatan tata kelola pemerintahan yang demokratis di bawah DO 1 dan kegiatan pendidikan di bawah DO 2 akan dijadikan target prioritas di wilayah yang menjadi fokus kegiatan. Kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di bawah DO 4 sebagian besar akan dilaksanakan di lokasi dimana terdapat universitas dan lembaga penelitian.



HIPOTESIS PEMBANGUNAN

Tujuan utama dari strategi ini, "**Menuju Indonesia yang lebih kokoh dalam memajukan pembangunan nasional dan global,**" mencerminkan aspirasi negara Indonesia untuk tahun 2005-2025: "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur" (BAPPENAS, 2007, hal 33.). Visi pembangunan jangka panjang Pemerintah Indonesia berdasarkan pada delapan tujuan, termasuk lembaga demokratis yang lebih kuat dan penegakan hukum, mengurangi kesenjangan sosial, keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, dan ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan, dan meningkatnya keterlibatan

Indonesia secara internasional. "Lebih kokoh" dalam konteks Indonesia memiliki pengertian "lebih berdaya" dan "rasa memiliki yang lebih besar". Kualitas Indonesia "yang lebih kokoh" akan ditunjukkan dengan kemampuan dan kemauan Indonesia untuk memimpin inisiatif lintas sektor, terus memberikan alokasi untuk inisiatif yang telah berhasil dan telah diselesaikan di dalam rencana anggaran sehingga dapat melanjutkan dampak pembangunan, dan menekankan bahwa USAID memosisikan diri sebagai mitra dan bukan donor. Pernyataan tujuan utama (*goal*) juga mengakui bahwa Indonesia harus menangani kesenjangan pembangunan dalam negeri dan memanfaatkan peluang pembangunan di luar negeri seiring dengan masa transisi dari penerima bantuan menjadi mitra dan *co-investor* dalam pembangunan. USAID/Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan pernyataan tujuan dan memastikan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan prioritas bersama untuk investasi pembangunan jangka panjang.

Negara-negara berpenghasilan menengah memainkan peran yang semakin penting dalam merancang pembangunan internasional sebagai donor, mitra, dan sumber daya ahli. Negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, yang merupakan donor dan penerima bantuan, memperlihatkan perspektif yang unik tentang pengalaman pembangunan, dan memainkan peran yang semakin penting dalam kampanye global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium - yaitu menurunkan kemiskinan ekstrim hingga separuhnya sampai dengan menghentikan penyebaran HIV/AIDS, penanganan berbagai permasalahan lingkungan, dan menyediakan pendidikan dasar untuk semua - telah menjadi tonggak penting dalam upaya pembangunan global dan nasional Indonesia. Kemitraan global dalam pembangunan semakin berfokus pada solidaritas dan kerjasama antar negara. Dengan semakin dekatnya tenggat waktu pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium yang akan berakhir pada tahun 2015, Indonesia turut membantu upaya internasional menentukan tonggak kemajuan melalui kepemimpinannya dalam proses penyusunan agenda pembangunan pasca 2015.

Hipotesis pembangunan dalam strategi ini berdasarkan pada hambatan utama yang telah diidentifikasi untuk mencapai kemajuan sebelumnya. Tata kelola pemerintahan (termasuk korupsi) dan pelayanan umum diidentifikasi sebagai dua titik kegiatan penting di Indonesia dalam mengatasi kesenjangan pembangunan dalam negeri. Secara regional dan global, Indonesia harus mempercepat pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan mengatasi tantangan pembangunan global dengan implikasi nasional dan regional, terutama yang berkaitan dengan penyakit menular, keanekaragaman hayati, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk ketahanan terhadap risiko bencana.

Pendekatan strategis berdasarkan sektor yang dahulu dilakukan oleh USAID seringkali tidak dapat mencapai dampak untuk beberapa Tujuan Kerjasama Pembangunan sekaligus. Oleh karena itu, strategi ini mencantumkan Kerangka Hasil sebagai acuan. Ada peluang untuk pendekatan terpadu yang menghubungkan tata kelola pemerintahan, IPTEK, inovasi, dan keterlibatan sektor swasta dengan tujuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pendekatan terpadu akan menghasilkan dampak yang lebih besar daripada menggabungkan bagian-bagiannya. Sub-Hasil Antara Kerjasama Pembangunan (*Sub-Intermediate result/Sub-IR*) disisipkan ke dalam Hasil Antara Kerjasama Pembangunan (IR) yang mendukung pencapaian DO dan tercermin pada tujuan utama CDCS secara keseluruhan.

Bagan 1 - Bagan Kerangka Hasil



Indonesia yang Lebih Kokoh dan Turut Memajukan Pembangunan Nasional dan Global

Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis Lebih Baik

Pelayanan Dasar Umum untuk Kelompok Paling Miskin dan Rentan Meningkat

Prioritas Pembangunan Global yang Menjadi Kepentingan Bersama Meningkat

Pencapaian Kerjasama Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Meningkat

Tema Utama

Persamaan, Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan, Kemitraan, Penjangkauan Masyarakat

Bagan 2 – Tujuan Kerjasama Pembangunan 1: Gambaran Kerangka Hasil



Tujuan Kerjasama Pembangunan 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis Lebih Baik

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia merupakan mitra yang penting karena keberhasilannya dalam melakukan konsolidasi demokrasi yang memberikan dampak di tingkat regional dan global. Minat Pemerintah AS terkait erat dengan keberhasilan demokrasi di Indonesia karena dua alasan utama: pertama, Indonesia memiliki kapasitas untuk secara positif mempengaruhi alur demokrasi di negara-negara lain di tingkat regional dan global, terutama negara-negara Islam dan/atau yang pernah mengalami pemerintahan otoriter, dan kedua, tata kelola pemerintahan yang demokratis yang sudah lebih baik di Indonesia menjanjikan dampak yang signifikan terhadap Tujuan Kerjasama Pembangunan lain yang diidentifikasi dalam strategi ini. Selanjutnya, walaupun Indonesia berhasil melalui masa transisi dari pemerintahan otoriter hingga saat ini, konsolidasi demokrasi secara penuh masih merupakan pekerjaan rumah yang belum selesai. Dalam beberapa analisis yang dilakukan oleh USAID, lembaga donor dan peneliti independen lainnya, telah jelas dinyatakan kebutuhan Indonesia untuk melanjutkan kemajuan yang sudah dicapainya dalam mengatasi hambatan terhadap pemerintahan yang demokratis, termasuk jaminan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. (USAID/Indonesia, 2013a; Aspinall et al, 2010; Saich et al 2010).

Akuntabilitas dan daya tanggap pemerintahan, kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kapasitas lembaga swadaya masyarakat (LSM), perlindungan hak-hak warga negara, ketersediaan pelayanan dasar, dan keberlanjutan di Indonesia Timur telah diidentifikasi sebagai hambatan kunci untuk pemerintahan yang demokratis dan secara umum untuk terciptanya pembangunan ekonomi yang

adil. Selain itu, dengan diskriminasi hukum dan peradilan yang meluas terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, Pemerintah Indonesia saat ini memiliki kemampuan yang terbatas untuk melaksanakan komitmen jender di tingkat nasional dan lokal. Sebagai contoh, dari 154 peraturan daerah yang telah disahkan pada tahun 2009 yang lalu, 63 di antaranya masih mengandung diskriminasi secara langsung terhadap perempuan, dan publik menilai banyak diantaranya yang tidak konsisten dengan konstitusi Indonesia (Komnas Perempuan, 2012). Kekerasan berbasis jender, tersebar di seluruh Indonesia khususnya di bagian timur, merupakan masalah hak asasi manusia yang memerlukan penanganan mendesak. Investasi dalam pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik berpotensi memberikan dampak global bila Indonesia dapat mencapai kemakmuran karena komitmennya terhadap akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang luas, dan perlindungan hak semua warga negara.

Akuntabilitas

USAID baru-baru ini menyelesaikan evaluasi tentang demokrasi, hak, dan tata kelola pemerintahan (DRG) dan menyimpulkan bahwa "sistem peradilan yang lemah dan sangat korup" merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintahan di Indonesia, dan juga pelayanan yang sangat tidak memadai (USAID /Indonesia, 2013a). Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam menangani imbas, penipuan, maupun penyalahgunaan yang berhubungan dengan korupsi, dan seringnya pemberitaan kasus korupsi tingkat tinggi dan dukungan masyarakat luas terhadap upaya anti-korupsi, masih banyak kemajuan signifikan yang harus dicapai. Selain itu, evaluasi DRG mengidentifikasi wilayah timur Indonesia sebagai wilayah yang memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi tantangan ini.

Untuk memfasilitasi konsolidasi demokrasi di Indonesia dan memungkinkan tata kelola pemerintahan yang efektif, sangat penting untuk menekan korupsi dan memperkuat penegakan hukum. Jika kinerja sektor peradilan, kemampuan lembaga-lembaga utama yang mengawasi akuntabilitas dalam memerangi korupsi, kapasitas pemangku kepentingan non-pemerintah yang meminta pertanggungjawaban pemerintah meningkat - dan dibantu oleh pers yang relatif bebas dan lebih profesional - maka keseluruhan akuntabilitas publik di Indonesia akan meningkat. Untuk mengatasi tantangan sistemik secara efektif, kelompok masyarakat - termasuk pelaku advokasi dari lembaga pemerintah maupun masyarakat sipil, media, universitas, dan sektor swasta - pemerhati akuntabilitas perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperkuat kapasitasnya. Hubungan dengan lembaga pemerintah AS lain yang juga memiliki fungsi akuntabilitas dan organisasi lain yang berpartisipasi dalam upaya ini akan aktif diupayakan untuk meningkatkan hasil IR 1.1.

Masyarakat Sipil

Saat ini demokrasi Indonesia mendapatkan manfaat dari adanya masyarakat sipil yang memiliki kemampuan teknis dan aktif di bidangnya, dan dalam beberapa subsektor tertentu (organisasi keagamaan dan media pada khususnya) berbagai kelompok tersebut memiliki akar yang kuat di masyarakat. Beberapa diantaranya telah menunjukkan keberlanjutan. Di banyak sektor di mana USAID melaksanakan kegiatan, organisasi masyarakat sipil (terutama yang terlibat dalam penelitian dan advokasi) masih mengandalkan pendanaan dari mitra pembangunan internasional. Berbagai organisasi tersebut cenderung memiliki manajemen yang lemah, kekurangan kapasitas di bidang lain, dan tidak cukup mempromosikan kesetaraan jender atau menangani ketidaksetaraan yang mempengaruhi kelompok masyarakat lain (baik di dalam organisasi tersebut dan di masyarakat yang lebih luas). Beberapa kelemahan tersebut bersifat internal dan beberapa kelemahan lain diperburuk karena lingkungan yang belum kondusif. Kontribusi teknis untuk pencapaian tujuan USAID di Indonesia dari berbagai organisasi tersebut akan terintegrasi di seluruh kerangka hasil. Jika kapasitas organisasi OMS dan NGO Indonesia meningkat, lingkungan yang kondusif bagi organisasi juga akan meningkat. Jika

berbagai organisasi ini mempromosikan hak asasi manusia bersama-sama dengan pemerintah Indonesia, maka partisipasi masyarakat akan meningkat secara bermakna di sektor tata kelola pemerintahan dan hak warga negara, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Perlindungan Hak Warga Negara

Kajian DRG menemukan bahwa kesenjangan penting lain dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia adalah perlindungan hak-hak warga negara. Kelompok marjinal - terutama dari kelompok agama dan etnis minoritas tertentu, perempuan, LGBT, pekerja seks, masyarakat adat, dan kelompok sangat miskin - merasa lebih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan meminta perlindungan atas haknya kepada negara.¹ Salah satu ukuran penting dari kinerja demokrasi adalah seberapa jauh demokrasi tersebut dapat melindungi hak-hak kelompok minoritas dari pelanggaran oleh kelompok mayoritas. Jika kelompok minoritas ini merasa disertakan dan dilindungi oleh sistem demokrasi, kelompok ini cenderung tidak akan mendukung alternatif non-demokratis, sehingga dapat memperkokoh konsolidasi demokrasi. Jika akses terhadap keadilan lebih merata dan sama untuk semua orang termasuk untuk kelompok marjinal serta kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara ditingkatkan, maka perlindungan hak-hak warga negara dengan sendirinya akan meningkat. Selanjutnya, dengan perlindungan hak warga negara secara rutin, peningkatan toleransi di antara masyarakat sipil juga dapat dibina.

Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan di Indonesia Timur

Tertinggalnya pembangunan serta ketidakpuasan warga di provinsi dan kabupaten/kota sasaran di Indonesia Timur dapat membahayakan kredibilitas Indonesia sebagai negara demokrasi modern. Untuk membalik kecenderungan ini, perlu peningkatan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan agar lebih inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pemerataan akses terhadap pelayanan dasar berkualitas di beberapa provinsi di wilayah ini. Belum sempurnanya tata kelola pemerintahan dapat menjadi sumber keresahan masyarakat dan menjadi tantangan pembangunan yang besar di Indonesia Timur dan dapat meluas ke berbagai sektor. Oleh karena itu, USAID akan bekerja secara lintas sektoral untuk menyelaraskan pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dengan menerapkan pendekatan pembangunan partisipatif yang akan meningkatkan keamanan dan peluang pembangunan. Meningkatnya keterlibatan masyarakat, ketersediaan kebutuhan pokok dan menurunnya kekerasan berbasis gender akan meningkatkan legitimasi tata kelola pemerintahan yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya hasil yang diinginkan dari pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata di kawasan ini.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.1: Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Akuntabilitas Meningkat

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan (IR) ini berfokus membina dan mempertahankan budaya akuntabilitas tata kelola pemerintahan di berbagai tingkatan pemerintahan termasuk tingkat nasional dan daerah di Indonesia. Gabungan pendekatan antara pasokan dan permintaan disusun berdasarkan hipotesis pembangunan yang mencakup: (a) peningkatan kapasitas, kemandirian, dan transparansi lembaga-lembaga yang merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas yang lebih besar, (b) meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan anggaran dan pengembangan sumber daya manusia di kementerian kunci; dan (c) menggabungkan dorongan eksternal termasuk dari masyarakat

¹ Program Pemerintah Indonesia PNPB Peduli yang didukung oleh Bank Dunia menawarkan data tentang keterkaitan kritis antara penurunan kemiskinan dan hak warga negara marjinal. <http://pnpm-support.org/pnpm-peduli>

sipil, media dan sektor swasta dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hal ini akan mengarah pada demokrasi yang lebih kuat dan akses terhadap pelayanan yang lebih baik dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Kegiatan yang dilakukan di bawah IR ini juga akan mendukung upaya USAID/Indonesia di bawah DO lainnya. Misalnya, bekerja dengan lembaga-lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan dikaitkan dengan upaya di bawah IR 2.3 tentang peningkatan akuntabilitas pelayanan masyarakat di tingkat provinsi.

Institusi yang menjadi sasaran kegiatan termasuk yang menangani administrasi penegakan hukum, badan anti-korupsi dan lembaga pemerintahan secara eksplisit memiliki fungsi akuntabilitas (termasuk entitas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Inspektorat Jenderal (Irjen), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan ORI). Fokus upaya ini akan mencakup penguatan penegakan hukum dan administrasi peradilan. Selain itu promosi kemajuan proses akuntabilitas merupakan hal yang penting, seperti contohnya reformasi birokrasi, sensitivitas yang lebih besar terhadap tantangan yang dihadapi oleh perempuan saat mengakses sistem peradilan, dan inisiatif transparansi. Kegiatan reformasi institusi di bawah IR ini akan menargetkan kementerian yang merupakan kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan lainnya dalam strategi ini. Sebagai contoh, kantor USAID/Indonesia mengupayakan strategi pelayanan kesehatan nasional berkualitas yang akan mencakup unsur akuntabilitas/sanksi, yang mungkin akan melibatkan Inspektorat Jenderal, beberapa lembaga di bidang peradilan, perizinan dan akreditasi. Selain itu, kemajuan penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan terorganisasi di dalam negeri maupun antar negara akan membantu memerangi pembalakan liar, mengurangi perdagangan satwa liar, dan meminimalkan penangkapan ikan yang ilegal. IR 1.1 juga akan memperkuat kemampuan OMS untuk menggunakan informasi publik untuk menuntut akuntabilitas yang lebih besar dan memanfaatkan media untuk mengkomunikasikan informasi tersebut dengan lebih baik. Terakhir, IR 1.1 akan memperjuangkan kepentingan bersama dan mengupayakan kemitraan dengan sektor swasta yang banyak berkontribusi terhadap praktik korupsi, sementara pihak lain berupaya dan melakukan advokasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.1.1: Akuntabilitas sektor peradilan meningkat

Sub-IR ini akan berfokus pada peningkatan kinerja dan transparansi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan memberikan bantuan teknis yang akan meningkatkan kualitas perekrutan petugas pengadilan, dan memberikan pengawasan etika bagi jaksa dan hakim. Peningkatan transparansi dalam perekrutan hakim dan peningkatan pengawasan etika akan mengurangi terjadinya perilaku korup di antara hakim dan jaksa, sehingga sistem keadilan menjadi lebih efektif dan efisien. Demikian juga, penekanan yang lebih besar pada pengendalian korupsi akan menghasilkan kredibilitas yang lebih besar di lembaga peradilan dan kejaksaan sehingga dapat mendorong lebih banyak warga masyarakat untuk melaporkan kejahatan. Akses terhadap informasi publik dari institusi kunci seperti media dan masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan transparansi sektor peradilan, meningkatkan kinerja dan manajemen pengadilan, mengurangi korupsi, serta memberdayakan masyarakat untuk mengetahui hak-hak hukumnya. Meningkatnya akses terhadap informasi publik dan meningkatkan standar etika peradilan dan jaksa memiliki dampak bagi sektor seperti perlindungan lingkungan yang terkena akibat korupsi di sektor peradilan, kurangnya integrasi perlindungan lingkungan dan penegakan hukum - sebuah temuan dari Kajian Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati USAID (USAID / Indonesia, 2013b). Untuk tujuan praktis, IR ini akan mendukung kegiatan yang memperluas pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah, termasuk hak perempuan atas tanah, dan akan menghubungkan akses terhadap sumber daya alam dan permasalahan hak kepemilikan dengan pembangunan rendah emisi dan inisiatif pelestarian keanekaragaman hayati di bawah DO 3.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.1.2: Kapasitas lembaga akuntabilitas kunci yang memerangi korupsi meningkat

Sub-IR ini akan mendukung upaya untuk meningkatkan dalam dan luasnya sistem akuntabilitas, efektivitas, dan sinergi lembaga akuntabilitas kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga yang dilibatkan mungkin termasuk KPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal, BPK, BAKN, ORI, dan Komisi Informasi Publik (KIP). Sub-IR ini mendukung upaya reformasi menuju sistem akuntabilitas yang lebih independen dan upaya sinkronisasi antara pencegahan korupsi dan penegakan hukum, memperluas kapasitas sistem akuntabilitas dan pengaruh pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sasaran.

Kegiatan di bawah Sub-IR 1.1.2 akan meningkatkan koordinasi pencegahan korupsi antara KPK sebagai lembaga terkemuka yang menangani anti-korupsi dan lembaga akuntabilitas kunci lainnya. Kegiatan potensial juga mencakup bantuan dalam mengembangkan mekanisme kerjasama yang dapat diterapkan oleh KPK dan lembaga peradilan lainnya untuk mencegah dan memberantas korupsi serta promosi pelatihan dalam pencegahan korupsi. Kegiatan mungkin termasuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas Inspektorat Jenderal, dan memberikan dukungan bagi berbagai Inspektorat Jenderal yang akan membantu upaya pencegahan korupsi. Kegiatan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem yang dapat mengendalikan kemungkinan penipuan di lembaga akuntabilitas kunci dan lembaga negara lainnya, meningkatkan pengambilan tindakan terhadap rekomendasi dari laporan BPK, dan membantu melakukan promosi pelayanan informasi yang tanggap terhadap permintaan publik sejalan dengan strategi yang disusun untuk pelayanan informasi proaktif. Strategi media dapat dirancang untuk mengkampanyekan perbedaan efek korupsi terhadap kehidupan sehari-hari baik bagi perempuan atau laki-laki. Pendekatan terpadu dapat diuji coba untuk menangani korupsi dengan sasaran pemerintah kabupaten/kota dengan pengeluaran anggaran tertinggi.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.1.3: Kapasitas para pemangku kepentingan dari LSM yang mendorong akuntabilitas pemerintah meningkat

Kegiatan di bawah Sub-IR ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan daya tawar pelaku non-pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, dengan menggunakan media sosial dan media lain yang umum dipakai, serta memperkuat gerakan anti-korupsi, terutama di tingkat daerah. Terkait erat dengan peningkatan kapasitas OMS/LSM di bawah IR 1.2, kegiatan di bawah Sub-IR 1.1.3 mungkin mencakup pelatihan tentang penggunaan media sosial untuk transparansi dan akuntabilitas dan pelatihan bagi media di wilayah tertentu tentang jurnalisme investigatif. Forum publik dapat dibentuk, baik dalam jaringan maupun luar jaringan, di tingkat provinsi/wilayah dan nasional dengan tujuan memperluas akses terhadap informasi publik. Sub-IR ini akan mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antara organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional, regional dan internasional yang bekerja di sektor anti-korupsi, termasuk melalui partisipasi aktif masyarakat sipil sebagai bagian dari kemitraan untuk Pemerintahan yang Terbuka (*Open Government Partnership*). Selain itu, penelitian dan advokasi akan mempromosikan berbagai permasalahan kunci di mana korupsi mungkin merajalela termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, perdagangan manusia, perizinan usaha, dan pengadaan barang untuk masyarakat. Kegiatan potensial lainnya termasuk mengukur dan menghitung indeks tingkat korupsi di setiap provinsi dan melakukan kampanye pendidikan di tingkat nasional dan provinsi tentang korupsi dan kerusakan yang ditimbulkannya pada masyarakat.

Hasil antara Kerjasama Pembangunan 1.2: Partisipasi Masyarakat Meningkat

IR kedua berfokus pada partisipasi yang luas tetapi strategis dari masyarakat sipil, yang dapat menjalankan tiga fungsi terkait dalam mendukung demokrasi di Indonesia. Pertama, fungsi pengawasan (*watch-dog*) yang meminta negara (pemerintah pusat dan daerah) bertanggung jawab atas warganya; kedua, fungsi advokasi memungkinkan organisasi independen untuk menyuarakan kepentingan kelompok konstituennya untuk tujuan spesifik; dan terakhir, fungsi pendidikan kewarganegaraan yang memberikan bekal kepada masyarakat sipil untuk melayani dan menjadi wahana pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. IR 1.2 akan berfokus pada OMS (termasuk kelompok pemikir tertentu) yang menekankan berbagai permasalahan yang terkait DO-1 (transparansi, akuntabilitas dan hak asasi manusia) serta OMS yang terlibat dalam DO 2 dan 3 (pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat).

Dalam ketiga sub-IR, analisis mengidentifikasi adanya harapan serta kesenjangan kapasitas yang signifikan di antara kelompok yang membentuk masyarakat madani di Indonesia (AusAID, 2012a, USAID/Indonesia, 2013a). Jika lingkungan yang mendukung dan kapasitas OMS dan LSM Indonesia ditingkatkan, dan jika organisasi dan pemerintah sengaja mempromosikan keterlibatan perempuan dan kelompok marginal (seringkali tidak diikutsertakan dalam debat publik dan kesempatan yang ada), maka partisipasi masyarakat akan lebih kuat. Kegiatan di bawah IR yang diusulkan dalam dokumen ini akan berfokus pada peningkatan kinerja kelompok sasaran di bidang pembangunan dan menciptakan lingkungan yang kondusif di mana semua organisasi secara sukarela melakukan kegiatannya untuk membangun keberlanjutan dan kapasitas internal. Sebagai contoh, kegiatan mungkin termasuk menggunakan peraturan perundangan Indonesia yang memungkinkan masyarakat memegang kendali untuk penggunaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya, untuk mendukung pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan juga rentan, serta memastikan bahwa kepentingan, kepemimpinan, dan keahlian tercakup dalam proses ini. Kegiatan juga dapat memastikan peningkatan kontribusi pelayanan oleh OMS dan LSM di bidang pendidikan dan kesehatan. IR ini akan memberikan dukungan khusus kepada organisasi yang melakukan advokasi dan mengorganisasikan dukungan untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan dalam kehidupan demokrasi, sosial, dan ekonomi di Indonesia.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.2.1: Kapasitas OMS dan LSM Indonesia meningkat

Kegiatan di bawah Sub-IR ini akan membangun kapasitas teknis dan manajemen internal dari OMS dan LSM yang akan menjamin akuntabilitas dan keberlanjutannya. Selain itu, melalui metode pengadaan inovatif, kapasitas OMS dan LSM untuk menerima dan mengelola dana akan diperkuat, termasuk OMS dan LSM yang bergerak di sektor-sektor seperti lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Potensi kegiatan termasuk memberikan pembelajaran teknis dan administratif serta peluang bimbingan dan pendanaan melalui mekanisme hibah kecil dan menengah. Selain itu, sistem audit, penelusuran, dan pemantauan OMS/LSM mulai dari tahap perencanaan akan membantu membangun kepercayaan dari masing-masing donor dan lembaga untuk melakukan investasi pembangunan.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.2.2: Lingkungan yang memberdayakan OMS dan LSM meningkat

Kegiatan potensial di bawah Sub-IR ini akan meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi OMS dan NGO dengan mendukung penyusunan dan pelaksanaan hukum dan peraturan perundangan yang menjamin prinsip kebebasan berserikat. Kegiatan di bawah Sub-IR 1.2.2 termasuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyusun kerangka peraturan yang memungkinkan pembangunan masyarakat sipil yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi ketidakpastian hukum atas kegiatan OMS, dan mendorong partisipasi warga negara. Target intervensi mungkin termasuk mendukung Koalisi Kebebasan Berserikat untuk melakukan advokasi peraturan yang efektif tentang tata

kelola OMS seperti peraturan perundangan tentang asosiasi, peraturan perundangan tentang yayasan, dan peraturan perundangan tentang organisasi massa. Kegiatan bisa termasuk melakukan dan mensosialisasikan penelitian dan analisis mengenai efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola OMS. Hal ini membantu meningkatkan keterpaparan Pemerintah Indonesia terhadap peraturan perundangan dan praktik yang diadopsi dan diterapkan oleh negara lain yang mengalami situasi serupa.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.2.3: OMS, LSM, dan pemerintah melakukan promosi kesetaraan jender

Sub-IR ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan, mempromosikan keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah, dan memperbaiki peraturan perundangan, kebijakan, dan peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan. Kehadiran organisasi perempuan dan berkembangnya perhatian terhadap permasalahan jender di antara OMS dan Pemerintah Indonesia menciptakan peluang bagi USAID untuk melakukan kegiatan berdasarkan kapasitas dan prioritas yang ada. Kegiatan potensial di bawah Sub-IR 1.2.3 mencakup penguatan kapasitas untuk melakukan dan menggunakan data dari analisis jender, meningkatkan praktik kesetaraan jender dari organisasi mitra, menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, mengembangkan kegiatan yang mengurangi ketidaksetaraan jender dan/atau kekerasan berbasis jender, serta pengumpulan dan penggunaan data yang sudah dipilah berdasarkan jender. Upaya di bawah sub-IR ini akan melengkapi penelitian operasional tentang topik seperti hambatan berbasis jender terhadap partisipasi politik dan akses terhadap keadilan; mendorong materi sensitif jender dalam sektor pendidikan tertentu; meningkatkan partisipasi siswa perempuan dalam program beasiswa dan pelatihan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan memastikan bahwa kebutuhan, minat, dan prioritas perempuan dianalisis dan dibahas dalam strategi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.3: Dilaksanakannya Promosi Perlindungan Hak Masyarakat

Konstitusi Indonesia tidak mengecualikan siapapun dari hak-hak sosial, politik, atau ekonomi, dan Indonesia berhasil mempertahankan keutuhan bangsa yang relatif mengesankan mengingat luas wilayah dan keberagaman penduduknya. Meskipun demikian, masih ada hambatan untuk mewujudkan hak-hak bagi banyak orang Indonesia. Masih ada kasus gangguan berupa rendahnya toleransi dan kekerasan terhadap agama, budaya, dan jenis kelamin kelompok minoritas dan marjinal lainnya (Komnas Perempuan, 2012). Perempuan juga terus menghadapi hambatan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial; dan pada tingkat lokal di beberapa daerah di Indonesia, kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan menjadi semakin umum. Tidak tercakupnya populasi tertentu dan pelanggaran hak secara terus menerus menimbulkan ancaman bagi konsolidasi demokrasi Indonesia, yang sebagian tergantung pada jaminan perlindungan hukum yang sama terhadap hak-hak semua warga negara.

IR ini memastikan bahwa hak-hak semua warga negara dilindungi oleh peraturan perundangan yang baik dan dilaksanakan secara obyektif, penegakan hukum yang bisa diandalkan, dan keputusan adjudikasi dapat diprediksi dan aksesnya juga terbuka untuk korban. Keberhasilan IR ini terlihat dari adanya penerimaan yang lebih besar terhadap perbedaan di antara masyarakat dan berkurangnya serangan kekerasan dengan target individu, kelompok, dan tempat ibadah, serta peningkatan pemberdayaan kelompok perempuan dan marjinal termasuk komunitas LGBT. Tantangannya terletak pada pelaksanaan kebijakan resmi, sehingga fokus IR ini adalah mendukung pembela hak asasi manusia termasuk individu, OMS, dan institusi; mengurangi kekebalan hukum pelaku pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) termasuk kekerasan seksual dan berbasis jender, dan pemberdayaan pihak pemerintah dan non-pemerintah untuk memutus siklus kekerasan yang relatif dapat diprediksi. Semua kegiatan tersebut

dapat mengungkap kebutuhan akan adanya sistem peradilan di mana korban pelanggaran hak asasi mempunyai tempat bernaung yang dilengkapi dengan upaya IR 1.1.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.3.1: Akses warga negara marjinal terhadap keadilan meningkat

Sub-IR ini akan membantu pengadilan dan kantor kejaksaan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberdayakan kelompok miskin dan minoritas yang menjadi korban kekerasan. Akses terhadap keadilan bagi kelompok marjinal sangat penting untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia dan kekebalan hukum. Inti dari rendahnya toleransi dan kekerasan terhadap minoritas adalah lemahnya sistem penegakan hukum. Komponen kunci dari sub-IR ini bertujuan memberdayakan korban yang mencari keadilan atas kejahatan yang dialaminya. Gambaran kegiatan yang akan dilakukan termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya sistem pengaduan hak asasi manusia dan pengoperasian sistem hukum, meningkatkan akses terhadap pelayanan hukum, dan meningkatnya penggunaan jasa paralegal dan advokasi berbasis masyarakat bagi kelompok marjinal termasuk perempuan, kelompok minoritas agama, dan LGBT. Hal ini termasuk peningkatan efektivitas sistem rujukan dari masyarakat ke pengadilan, kantor kejaksaan, dan pemerintah daerah masing-masing. Salah satu komponen penting adalah bantuan teknis untuk meningkatkan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia melalui sistem hukum dan advokasi untuk memastikan sistem peradilan menangani keluhan-keluhan tersebut.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.3.2: Kemampuan pemerintah untuk melindungi hak warga negara meningkat

Selain memperkuat kapasitas organisasi pelaku advokasi di bawah IR 1.2, Sub-IR ini akan meningkatkan kerjasama antara OMS dan pemerintah tentang permasalahan perlindungan hak. Kegiatan mungkin termasuk memfasilitasi dialog melalui berbagai proses pendukung di mana perwakilan kunci Pemerintah Indonesia, organisasi advokasi, dan perwakilan dari kelompok-kelompok marjinal atau korban pelanggaran hak dapat berinteraksi secara produktif. Bantuan dapat diberikan untuk meningkatkan pengumpulan data yang sudah dipilah, analisis, dan komunikasi hasil analisis oleh LSM dan organisasi advokasi untuk membantu memberikan masukan kebijakan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Bantuan teknis atau bimbingan sebagai rekan sejawat dapat diberikan kepada kementerian dan lembaga yang memegang posisi kunci untuk permasalahan ini seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Perempuan dan Perlindungan Anak dan lain-lain untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dengan tepat. Kegiatan tersebut dapat meliputi pelatihan, bantuan teknis, dan penjangkauan masyarakat untuk memperluas bantuan hukum bagi kelompok marjinal dan korban yang akan memastikan sistem peradilan merespon pentingnya perlindungan dan memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, dukungan dapat diberikan untuk melakukan advokasi penyusunan prioritas alokasi anggaran untuk memberikan bantuan hukum bagi kelompok minoritas.

Hasil antara Kerjasama Pembangunan 1.4: Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Sasaran di Wilayah Timur Indonesia Meningkat

Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sosial budaya yang beragam, semuanya merupakan aset penting bagi negara. Meskipun Indonesia mencapai kemajuan yang mengesankan di bidang lain, tapi akan menjadi contoh yang kurang menarik dari sisi keberhasilan pembangunan bangsa dan demokrasi kecuali indikator pembangunan manusia di Indonesia timur meningkat secara signifikan. Mengingat resolusi positif dari konflik Aceh, banyak alasan tepat untuk percaya bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan pembangunan di wilayah timur. Dalam nomenklatur USAID sebelumnya, Indonesia Timur (Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan

Papua) akan diarahkan di bawah Tujuan Kerjasama Pembangunan Khusus. Di bawah rencana strategis ini, minat USAID di Indonesia Timur menggarisbawahi hambatan yang paling kritis dan tantangan terbesar bagi pembangunan di beberapa provinsi sasaran terkait dengan tata kelola pemerintahan yang demokratis; semua hal tersebut tercakup dalam DO 1. Berbagai masalah tersebut terlihat dari cara pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan pelayanan publik yang menjadi mandatnya. Tantangan lebih lanjut termasuk kebutuhan untuk meningkatkan berbagai aspek keamanan masyarakat termasuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi warga serta kapasitas yang lebih baik untuk melindungi kelompok rentan yang sering tidak memiliki akses terhadap keadilan atau jalan lain ketika menjadi korban. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan demokratis di provinsi terpilih di Indonesia Timur akan membantu Indonesia mewujudkan cita-citanya menjadi negara terkemuka di dunia dalam hal promosi demokrasi, meningkatkan hasil pembangunan, mengurangi ketidakpuasan, dan meningkatkan loyalitas warga di berbagai provinsi tersebut.

Dalam menyusun fokus di Indonesia Timur, USAID mengetahui tantangan pembangunan di wilayah ini merupakan yang paling sulit yang akan ditanganinya di Indonesia - tantangan ini akan membutuhkan investasi multi-sektoral yang melampaui periode lima tahun strategi CDCS ini. USAID memiliki berbagai program yang masih berjalan dan riwayat panjang keterlibatan dan hubungan di Indonesia timur. Tugas ini akan memberikan kredibilitas yang berbeda terhadap posisi USAID di antara mitra pembangunan internasional lainnya dalam meningkatkan dampak di propinsi sasaran. Penguatan struktur sosial akan membutuhkan dukungan saat Pemerintah Indonesia berupaya untuk lebih memenuhi rangkaian kebutuhan dasar dan secara meyakinkan menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dan politik sebagai warga negara jauh lebih besar daripada daya tarik pemberian otonomi yang lebih besar. Kegiatan USAID di daerah ini akan membutuhkan pendekatan yang berbeda dan spesifik karena kedalaman masalah dan bagaimana menyatakannya di arena politik nasional. IR ini akan meningkatkan upaya partisipasi masyarakat yang mendekatkan masyarakat dan pemerintah, menyalurkan keluhan, meningkatkan efektivitas, dan memberikan masukan yang lebih baik untuk penyusunan kebijakan yang akan mengurangi ketegangan sosial dan politik. Banyak pengaduan warga berawal dari kurangnya kualitas pelayanan dasar yang tersedia untuk masyarakat banyak. Demikian pula, kurang meratanya manfaat dari pengelolaan sumber daya alam secara tepat telah lama menjadi sumber ketegangan sosial yang lebih memperdalam kecurigaan dan akan menjadi bidang kegiatan di bawah IR ini.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.4.1: Partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan masyarakat meningkat

Sub-IR ini akan memperkuat partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Kegiatan ini akan mencakup pelatihan dan bantuan teknis kepada pemerintah sasaran dan mitra OMS/LSM mengenai metode untuk meningkatkan dialog masyarakat. Dialog antara para pemangku kepentingan mengenai berbagai permasalahan seperti pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat akan mendapatkan dukungan. Intervensi sasaran dapat mencakup pelatihan, pendampingan, dan bantuan perencanaan bagi LSM dan OMS tentang advokasi perencanaan pembangunan. Kegiatan di bawah sub-IR ini akan mengupayakan peningkatan jumlah sengketa yang dapat diselesaikan di tingkat masyarakat.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.4.2: Pelayanan dasar umum meningkat

Kegiatan akan mendukung peningkatan pelayanan dasar umum (kesehatan, pendidikan, air, dan sanitasi) dari pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk meningkatkan akses kelompok miskin dan marjinal. Potensi kegiatan meliputi pelatihan advokasi dengan sasaran belanja APBN untuk perbaikan infrastruktur, pemeliharaan, dan perlengkapan; pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia dan insentif kinerja; serta dukungan untuk program yang dirancang

untuk meningkatkan keterampilan dan kepekaan budaya tenaga kesehatan, administrasi, akuntabilitas dan penyeliaan, pengumpulan data yang sudah dipilah, dan keterampilan analisis data yang akan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 1.4.3: Kekerasan berbasis jender menurun

Upaya dalam Sub-IR ini bertujuan untuk mengurangi kekerasan berbasis jender (GBV) di Indonesia Timur. Potensi kegiatan meliputi pelatihan dan bantuan teknis untuk membantu meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan penuntutan hukum terhadap pelaku pelanggarannya. Dukungan dapat diberikan dalam melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang peraturan perundangan saat ini tentang GBV untuk meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjamin hak-hak keamanan perempuan dan anak. Intervensi sasaran mungkin termasuk mengajak laki-laki dan anak laki-laki mengubah sikap tentang GBV, meningkatkan respon dan pelaporan berbasis masyarakat, pelayanan rujukan untuk memberikan dukungan kepada para penyintas, dan pemetaan daerah untuk mengidentifikasi insiden kekerasan berbasis jender berdasarkan frekuensi sehingga kegiatan dapat lebih tepat sasaran. Upaya yang dilakukan mungkin mencakup dukungan untuk pusat masyarakat, tempat singgah untuk penyintas kekerasan dalam rumah tangga, dan wahana lain yang dapat membentuk wilayah yang aman untuk memberikan perlindungan segera dan dukungan jangka panjang bagi penyintas.

Bagan 3 – Tujuan Kerjasama Pembangunan 2: Gambaran Kerangka Hasil



Tujuan Kerjasama Pembangunan 2: Pelayanan Dasar Esensial untuk Kelompok Paling Miskin dan Rentan Meningkat

Tujuan Kerjasama Pembangunan 2 merupakan kontribusi strategis USAID untuk menghentikan kematian ibu dan anak karena penyebab yang dapat dicegah, meningkatkan pemenuhan pendidikan yang relevan dengan dunia kerja, membangun kapasitas pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan kemitraan swasta. USAID memiliki keunggulan komparatif untuk mencapai dampak manfaat yang paling tinggi bagi masyarakat miskin dan rentan di berbagai bidang yang saling berkaitan.

Manfaat dari transisi ekonomi dan demokrasi yang cepat perlu mencakup seluruh warga negara Indonesia. Tapi sebagian besar penduduk - yang paling miskin dan rentan - mungkin tertinggal jika kebutuhan dasarnya tidak ditangani. Indikator kesehatan dan pendidikan di Indonesia terus stagnan. Kesenjangan ini terlihat jelas di seluruh indikator kesehatan ibu dan anak, termasuk persalinan di fasilitas kesehatan, angka vaksinasi, dan kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi; semua hal tersebut berhubungan dengan kekayaan dan pendidikan. Sebagai contoh, angka kematian ibu dan anak paling tinggi di antara orang miskin dan tidak berpendidikan (BPS, 2007; BPS, 2012). Akses terhadap air dan sanitasi juga sangat terkait dengan status ekonomi. Pada tahun 2006, Indonesia kehilangan sekitar Rp 56 triliun (6,3 juta dollar AS) karena sanitasi dan kebersihan yang buruk, setara dengan sekitar 2,3 persen dari produk domestik bruto (Bank Dunia, 2008). Sebaliknya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa investasi di bidang air dan sanitasi akan memberikan keuntungan ekonomi paling sedikit lima kali lebih tinggi (2009). Ada hubungan yang signifikan antara kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun Indonesia terus tumbuh secara ekonomi, tetapi peningkatan akses terhadap pendidikan, dan pelayanan kesehatan berkualitas yang relevan bagi kelompok paling miskin dan rentan akan semakin mempercepat dan mempertinggi dampak manfaat pada masing-masing indikator tersebut dan memastikan lebih banyak masyarakat Indonesia yang diuntungkan oleh pertumbuhan tersebut. Dengan pemerintahan yang terdesentralisasi, pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan OMS/LSM merupakan hal yang vital bagi pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah. Selanjutnya, inovasi, teknologi, atau investasi strategis sektor swasta dapat mempercepat atau membangun keberlanjutan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini.

Kesehatan

Strategi Inisiatif Kesehatan Global USAID (2011-2016) mencerminkan komitmen USAID untuk membantu Indonesia mencapai tujuan MDGs di bidang kesehatan. Indonesia merupakan negara dengan angka kematian ibu (AKI) tertinggi di tingkat regional meskipun terlihat meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 228/100.000 menjadi sekitar 359 per 100.000. Angka ini merupakan indikator kuat dari kualitas sistem kesehatan untuk menghentikan kematian yang dapat dicegah. Angka Kematian Balita telah sedikit menurun, dari 44/1.000 menjadi 40/1.000. Angka kematian bayi baru lahir tidak menurun selama 10 tahun, dan saat ini lebih dari setengah dari kematian balita merupakan kematian bayi baru lahir. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat mencapai tujuan MDGs 2015 sebesar 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran, dan mungkin juga tidak mencapai tujuan penurunan angka kematian anak balita. Ketidaksetaraan merupakan elemen kunci terhadap pelayanan kesehatan dasar: 25 persen penduduk Indonesia paling miskin memiliki angka kematian balita tiga kali lebih tinggi dari 25 persen kelompok paling kaya. Bahkan ada masalah yang lebih besar untuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu (BPS, 2012). Persalinan di fasilitas kesehatan berhubungan langsung dengan kuintil kekayaan, dan persalinan dengan tenaga kesehatan di fasilitas secara langsung berhubungan dengan hasil persalinan dan kelahiran (BPS, 2007). Karena sebagian besar kasus kematian

ibu dapat dicegah, penting untuk melihat status dan pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan hak-hak kesehatan reproduksi, khususnya di kalangan perempuan muda miskin, dan juga untuk menjelaskan beberapa bagian dari masalah ini.

84 persen rumah tangga memiliki akses terhadap pasokan air, dimana hanya 59 persen yang memiliki akses terhadap sanitasi, dan Indonesia tidak dapat mencapai tujuan MDGs - semua permasalahan tersebut sangat terkait dengan tingkat penyakit diare. Perluasan akses terhadap pelayanan air dan sanitasi, termasuk peningkatan kapasitas PDAM sebagai salah satu instansi yang memberikan pelayanan ini, serta promosi peningkatan praktik kebersihan, sangat penting untuk mengurangi terjadinya penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut perkiraan WHO, diare merupakan penyebab kedua kematian balita atau 18 persen dari kematian anak (2009). Upaya nasional yang signifikan diperlukan untuk mempercepat kemajuan pencapaian kesehatan ibu dan anak serta sasaran di bidang air dan sanitasi.

Faktor keuangan, sosial, dan budaya yang kompleks membatasi akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan. Seringkali keputusan tentang kesehatan reproduksi diambil oleh laki-laki atau saudara perempuan yang lebih tua. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia akan menggulirkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu upaya untuk mengurangi biaya yang menjadi hambatan bagi pemerataan pelayanan kesehatan. Program ini akan menjadi sebuah upaya tahun jamak untuk memastikan cakupan yang tepat dan adil. Menjaga kualitas pelayanan, peraturan yang tepat dan sistem kesehatan yang kuat sangat penting untuk meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan, dan untuk menjangkau perempuan miskin dan rentan.

Pendidikan

Indonesia memiliki banyak sumber daya untuk mendukung pendidikan dasar dan sudah menunjukkan angka partisipasi murni yang tinggi (95 persen) untuk tingkat SD. Pendidikan tidak dipungut biaya (meskipun sekolah mungkin memberlakukan biaya untuk beberapa pelayanan) dan wajib belajar diterapkan sampai tingkat sekolah menengah pertama (Kelas 9) dengan tingkat melek huruf yang tinggi. Meskipun sudah ada pencapaian tersebut, tapi masih ada kesenjangan dalam kualitas pendidikan khususnya di lembaga pendidikan pasca sekolah dasar untuk kelompok miskin. Angka partisipasi kasar dan murni turun tajam setelah tingkat SLTP dengan hanya 58 persen siswa melanjutkan sekolah, dan yang paling miskin dan rentan hampir tidak memiliki akses terhadap peluang pendidikan tinggi. Meskipun Indonesia telah membuat langkah besar dalam mencapai kemajuan akses dan kualitas pendidikan dasar, kebutuhan yang belum terpenuhi masih tinggi dan dapat membantu siswa Indonesia memilih untuk mengikuti program akademis dan memperoleh tingkat keterampilan yang lebih tinggi, atau pelatihan keterampilan kejuruan/praktik kerja sehingga dapat secara efektif masuk ke dalam angkatan kerja (Bank Dunia, 2012a). Sistem pendidikan masih cenderung menempatkan laki-laki dan perempuan menurut peran tradisional dan menyalurkan siswa laki-laki dan perempuan ke dalam studi dan pilihan karir yang spesifik menurut gender, sehingga hanya sedikit perempuan yang bekerja di sektor ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi - sektor yang diharapkan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, harus dilakukan lebih banyak upaya untuk mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan lebih banyak lulusan dari lembaga pasca pendidikan dasar yang memasuki dunia kerja.

Dua kegiatan pendidikan dasar yang sudah dimulai dari sebelumnya akan dilanjutkan di bawah strategi ini untuk memenuhi komitmen sebelumnya. Program PRIORITAS USAID untuk Pendidikan Dasar (2012-2017) saat ini dimodifikasi sebagian agar sejalan dengan Tujuan 1 Strategi Pendidikan USAID yaitu *Keterampilan Membaca untuk 100 Juta Anak di Sekolah Dasar Meningkatkan Hingga Tahun 2015*. Kajian

terfokus yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui Keterampilan Membaca Usia Dini (EGRA) menunjukkan bahwa pemahaman bacaan tetap menjadi tantangan di sekolah dasar. Oleh karena itu, kegiatan kedua adalah rencana kajian EGRA tingkat nasional untuk membantu memberikan masukan modifikasi tambahan yang mungkin diperlukan untuk program PRIORITAS. Program pendidikan dasar diharapkan akan sepenuhnya didanai dari alokasi Pendidikan Dasar FY 2014. Setiap sumber daya tambahan untuk pendidikan dasar, di luar kebutuhan dana untuk program ini, akan tercakup di bawah kegiatan di Indonesia Timur yang sejalan dengan Strategi Pendidikan USAID.

Keterampilan yang dipelajari di sekolah kejuruan umumnya tidak terhubung dengan baik dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dan bahkan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pendidikan menengah dan pelatihan kejuruan sebagai kunci untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bangsa dan memastikan pertumbuhan masa depan. Sektor pendidikan tinggi (termasuk politeknik, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan guru serta universitas) memiliki peran penting baik dalam melatih pengelola pelayanan esensial maupun mendidik manajer masa depan, spesialis bidang teknis, dan pemimpin. Jumlah lulusan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi sangat rendah dengan angka partisipasi kasar sekitar 25 persen, hal ini menyoroti terbatasnya kemampuan untuk melatih tenaga di bidang pelayanan maupun kemampuan menumbuhkan angkatan kerja berpendidikan tinggi (Bank Dunia, 2012a). Pendaftaran di sekolah kejuruan cenderung mencerminkan segmentasi pasar tenaga kerja berdasarkan gender dengan siswa laki-laki terkonsentrasi di bidang yang berorientasi pada industri sedangkan siswa perempuan terkonsentrasi pada program yang berorientasi pelayanan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengkaji strategi yang berbeda untuk memperluas akses terhadap pendidikan menengah dan kejuruan dengan lebih banyak mendekati pelayanan ke daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Di antara strategi ini adalah perluasan wajib belajar hingga tingkat sekolah menengah atas yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemdikbud). Di bawah inisiatif ini, Pemerintah Indonesia akan meningkatkan anggaran operasional sekolah untuk sekolah menengah atas, memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin, membangun sekolah baru, dan memberikan insentif kepada para pendidik.

Hasil antara Kerjasama Pembangunan 2.1: Pelayanan untuk Menurunkan Kematian Karena Penyebab yang Dapat Dicegah Terutama di Antara Perempuan dan Anak-Anak Meningkat

IR ini menargetkan penurunan kematian ibu karena penyebab yang dapat dicegah saat persalinan dan melahirkan, dan juga penurunan kematian bayi baru lahir dan balita. Untuk mencapai hasil ini: (1) kualitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, (2) hambatan terhadap akses harus diturunkan, dan (3) akses/penggunaan air bersih dan sanitasi ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik, USAID/Indonesia akan mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan di sektor pemerintah dan swasta. Variasi kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan merupakan faktor penting yang menyebabkan lambatnya peningkatan indikator kesehatan. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi hambatan budaya, logistik, politis, dan keuangan untuk mengakses pelayanan ini bagi kelompok paling miskin dan rentan akan menurunkan kematian ibu dan anak di tingkat lokal maupun nasional. Upaya ini menempati prioritas tinggi Pemerintah Indonesia, yang terlihat dengan adanya rencana untuk menggelar UHC 2014 - 2019 (periode ini bertepatan dengan jangka waktu strategi ini). Mempercepat rujukan perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat adalah penting dan banyak memiliki keterkaitan dengan komponen sosial, budaya, gender, dan keuangan. Tenaga kesehatan memiliki tingkat pendidikan *pre-service* atau pelatihan *in-service* yang berbeda, dan peraturan yang ada mengenai kapasitas dan kinerja tidak memadai; selain itu tenaga kesehatan swasta hampir tidak diregulasi sama sekali. Pertanggungjawaban untuk pelayanan yang buruk hampir tidak ada. Disamping itu, akses masyarakat miskin terhadap pasokan air dihadang oleh hambatan keuangan, waktu, kemiskinan, dan budaya dan hal

ini berpengaruh terhadap kesehatan yang buruk dan mengurangi peluang pertumbuhan ekonomi. IR ini akan mencakup kegiatan untuk meningkatkan berbagai hal berikut: meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi kesehatan untuk mempromosikan kelangsungan hidup ibu dan bayi baru lahir; meningkatkan rujukan dari tingkat masyarakat dan kabupaten/kota ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, menurunkan hambatan untuk mengakses pelayanan kesehatan, meningkatkan akses terhadap pelayanan air dan sanitasi; mendorong keberlanjutan perusahaan air dengan model pengelolaan secara komersial; dan mempromosikan penerapan higiene yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan anak, khususnya di antara kelompok paling miskin dan rentan.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.1.1: Kualitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta meningkat

Ilustrasi kegiatan di bawah Sub-IR ini termasuk: meningkatkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal di fasilitas kesehatan yang utama; membangun jaringan antara rumah sakit dan klinik untuk mempromosikan peningkatan mutu secara terus menerus; meningkatkan kualitas standar klinis dan administratif/manajemen; memberikan bantuan teknis kepada organisasi profesi medis untuk menerapkan dan mempromosikan tindakan intervensi yang dapat menyelamatkan jiwa ibu dan bayi baru lahir berdasarkan data; dan meningkatkan pendidikan kesehatan dan pemberdayaan ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan di desa sehingga kualitas pelayanan semakin luas untuk semua masyarakat. Kegiatan potensial lainnya termasuk: bantuan teknis dengan target yang telah ditentukan kepada pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan Strategi Nasional Pelayanan Kesehatan Berkualitas; mendukung badan akreditasi nasional rumah sakit untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kualitas; dan bantuan teknis jangka pendek atau jangka panjang dengan target yang telah ditentukan kepada mitra kunci dari pihak pemerintah atau non-pemerintah.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.1.2: Hambatan akses kelompok miskin dan paling rentan berkurang

Hambatan akses terhadap pelayanan bagi masyarakat paling miskin dan rentan harus dikurangi, termasuk hambatan berbasis gender, contohnya persetujuan suami sebelum seorang istri dapat dirujuk untuk pelayanan kegawatdaruratan obstetri, atau hambatan yang menghalangi perempuan yang belum menikah untuk mengakses pelayanan. Kegiatan potensial di bawah Sub-IR 2.1.2 termasuk dukungan untuk pengguliran UHC di tingkat nasional dan pelaksanaannya di daerah, terutama untuk kuintil termiskin. Intervensi dengan target yang telah ditentukan akan meningkatkan sistem rujukan yang memastikan perbaikan akses bagi kuintil termiskin terhadap pelayanan kesehatan, misalnya dengan memperluas jaringan pertukaran informasi rujukan menggunakan SMS² dan penguatan serta perluasan jaringan rumah sakit (baik pemerintah maupun swasta) dengan puskesmas untuk memperkuat kualitas dan pelayanan rujukan dan mengurangi hambatan terhadap pencarian perawatan.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.1.3: Akses terhadap air dan sanitasi yang baik meningkat

Kegiatan potensial di bawah Sub-IR 2.1.3 termasuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang lebih baik untuk Air, Sanitasi, dan Higiene (WASH) melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, dan upaya mendidik masyarakat seperti program Pemerintah Indonesia untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk menciptakan permintaan masyarakat untuk pelayanan. Akses terhadap pelayanan air dan sanitasi akan diperluas kepada kelompok miskin melalui keterlibatan yang lebih kuat dengan dan di

²Di bawah program yang sedang berjalan saat ini, sistem elektronik yang disebut "Sjariemas" memungkinkan bidan mengirimkan informasi ke rumah sakit rujukan dengan SMS ke satu nomor khusus, dan menerima umpan balik dari rumah sakit untuk memastikan pelayanan rujukan yang lebih cepat dan tepat ke tempat yang tepat, dan bahwa rumah sakit sudah siap untuk memberikan perawatan kepada pasien.

antara sektor keuangan pemerintah dan swasta. Bantuan teknis dan pengembangan kapasitas akan diberikan kepada lembaga yang memberikan pelayanan kepada kelompok miskin untuk menjamin keberlanjutan operasionalnya setelah kegiatan USAID selesai dan terus dapat memperluas pelayanannya secara mandiri. Upaya ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah serta DPRD menggalang lingkungan yang kondusif dan dapat menjamin pelayanan pasokan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi kelompok termiskin melalui konsensus terhadap target, penyusunan kebijakan dan peraturan, serta identifikasi sumber keuangan.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.2: Kualitas, Relevansi, dan Akses terhadap Sub-Sektor Pendidikan Sasaran Meningkatkan

IR 2.2 membahas kurangnya kesempatan mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu dan rentan dengan meningkatkan pendidikan yang lebih terhubung dengan pekerjaan melalui peningkatan kualitas, relevansi, dan mudahnya akses terhadap sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi. Fokus pada pendidikan pasca-sekolah dasar dan pendidikan tinggi akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan esensial (di bidang kesehatan, air/sanitasi, dan pendidikan kejuruan) dengan melatih penyedia pelayanan utama termasuk guru, pelatih guru, perawat, dan tenaga pelayanan masyarakat. Fokus USAID pada peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi akan melengkapi Indonesia dengan tenaga kerja yang memiliki pendidikan lebih baik, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan semi-terampil yang secara signifikan belum terpenuhi, dan menjadikan Indonesia lebih produktif dan kompetitif. Kegiatan di bawah IR 2.2 akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan rentan melalui sistem pelayanan pendidikan yang mapan, seperti institusi pendidikan guru, jurusan keguruan dan ilmu pendidikan di universitas setempat, komite jaminan kualitas, sekolah, dan Kementerian yang menangani pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama). Kegiatan juga akan berupaya mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan meningkatkan angka partisipasi kerja untuk pekerjaan berkualitas. Pendidikan baik formal maupun non-formal akan diperkuat dengan memperbaiki persiapan belajar-mengajar dan meningkatkan anggaran di tingkat pemerintah daerah yang menggabungkan pendekatan inovatif di bidang pendidikan dengan melibatkan sektor swasta dan LSM. Berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan akan terlibat dalam koordinasi dan advokasi kebijakan - termasuk media dan pemerintah pusat - untuk menjamin akses yang lebih luas terhadap pelayanan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.2.1: Keterampilan guru/dosen, tenaga kependidikan, dan tokoh pendidikan meningkat

Peningkatan kualitas dan akses pendidikan pasca-pendidikan dasar memungkinkan siswa yang akan putus sekolah (mungkin yang berada di daerah yang kurang terlayani atau miskin) untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Kegiatan potensial termasuk memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas belajar-mengajar di sekolah menengah kejuruan, politeknik dan akademi, sehingga membantu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka lulusan yang memiliki kesempatan kerja lebih baik dan pekerjaan dengan kualitas lebih tinggi. Upaya ini juga akan mencakup koordinasi dengan Pemerintah Indonesia dalam menyusun inisiatif kebijakan pendidikan khususnya untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan agar lebih siap pakai. USAID juga akan mendorong kemitraan antara institusi pasca-pendidikan dasar (terutama sekolah kejuruan dan politeknik) dan pengusaha sektor swasta yang memiliki lapangan kerja. Selain itu, kegiatan dapat termasuk peningkatan kapasitas organisasi, anggaran, dan administrasi di lembaga pendidikan tinggi (misalnya akademi, politeknik) yang melayani

masyarakat miskin dan rentan dan pada gilirannya membantu meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.2.2: Inklusivitas, akuntabilitas dan transparansi sistem meningkat

Kegiatan potensial di bawah Sub-IR 2.2.2 meliputi peningkatan proses kajian siswa/sistem pendidikan kejuruan dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah untuk memperkuat penyeliaan teknis dan standarisasi kualitas dan pelayanan sekolah. Kegiatan dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan data sektor pendidikan untuk menciptakan permintaan atas pelayanan yang lebih baik dan dukungan bagi siswa saat melewati siklus pendidikan (misalnya melalui beasiswa dan mekanisme lainnya).

Peningkatan inklusivitas, akuntabilitas, dan transparansi diharapkan dapat menghasilkan sekolah yang lebih kuat dan menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang relevan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih siap menghadapi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tambahan.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.2.3: Promosi pendekatan pendidikan inovatif, administratif, dan pengambilan keputusan yang tanggap terhadap dunia kerja dilakukan

Kegiatan potensial di bawah Sub-IR 2.2.3 termasuk meningkatkan hubungan antara sekolah, universitas, akademi, dan sektor swasta untuk meningkatkan relevansi pelayanan pendidikan sehingga dapat memenuhi standar yang dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia dan sektor swasta dan sesuai keinginan siswa. Peningkatan manajemen dan tata kelola di tingkat sekolah akan meningkatkan perencanaan program dan pengambilan keputusan berbasis data. Bantuan teknis dapat diberikan kepada pemerintah untuk pengumpulan data dan analisis yang dipilah menurut jenis kelamin sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan dan program yang akan meningkatkan akses dan kualitas sekolah kejuruan, akademi, politeknik, institusi pendidikan guru, dan universitas yang menerima siswa dari kelompok paling miskin dan rentan. Sektor swasta dan institusi pendidikan tinggi akan dilibatkan untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan inovatif di bidang pendidikan dan untuk menjajaki kemungkinan investasi bersama. Selain itu, dukungan mungkin akan diberikan untuk inisiatif/model pendidikan berbasis masyarakat yang akan meningkatkan potensi dan kesempatan bagi siswa kurang mampu dan/atau kelompok marjinal lainnya.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.3: Tata Kelola Pelayanan Esensial di Daerah Lebih Kuat

Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan di daerah untuk memberikan pelayanan esensial umum berkualitas tinggi merupakan kunci untuk mencapai kemajuan dalam DO 2. Di bawah IR 2.3, kapasitas dan kemitraan dengan pemerintah, OMS/LSM, dan sektor swasta akan dikembangkan dan ditingkatkan. IR 2.3 merupakan inti untuk mencapai DO 2. Tata kelola yang buruk dari sektor pelayanan masyarakat, terutama di tingkat daerah, dan kebutuhan akan kapasitas yang lebih baik di sektor LSM dan keterlibatan sektor swasta merupakan faktor-faktor utama yang membatasi pencapaian DO. Di era desentralisasi, kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan secara efektif, responsif, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan faktor kritis. Selain itu, memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang cukup agar terus memberikan pelayanan meskipun menghadapi perubahan politik, atau gejolak lainnya merupakan komponen penting dari kapasitas ini. Peran masyarakat sipil sangat penting dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah, memberikan informasi faktual kepada masyarakat, dan membantu menegakkan standar yang tinggi untuk pelayanan. Selain itu, LSM memainkan peran penting dalam penyediaan pelayanan bagi yang paling rentan, dan saat masyarakat sipil semakin aktif dan terlibat, ada kebutuhan untuk membangun kapasitas agar dapat mandiri. Terakhir, sektor swasta memiliki potensi besar untuk menjadi mitra konstruktif dan penting dalam investasi di bidang pelayanan dan sebagai advokat bagi masyarakat sipil. IR ini akan

mengupayakan peningkatan investasi sektor swasta untuk memperbaiki pasokan dan permintaan terhadap pelayanan berkualitas tinggi

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.3.1: Efektifitas dan akuntabilitas pemerintah dalam ketersediaan pelayanan di daerah meningkat

Kegiatan potensial di bawah Sub-IR 2.3.1 termasuk memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan akuntabilitas, penyediaan, dan kepatuhan lembaga pemerintah di daerah terhadap standar pelayanan, dengan perhatian khusus pada bagaimana pelayanan tersebut dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan. Bantuan akan diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana dan anggaran pelayanan esensial di bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan air, dan untuk membangun kapasitas, transparansi, dan respon masyarakat dalam proses yang akan dijalankan. Sub-IR ini, dalam hubungannya dengan IR 4.2, akan mengembangkan pengambilan keputusan berbasis data - misalnya peningkatan pemanfaatan audit maternal dan perinatal untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan kematian ibu dan bayi baru lahir di tingkat kabupaten/kota. Sub-IR ini juga akan mendukung kemampuan pemerintah daerah untuk mendengarkan dan menanggapi umpan balik dari masyarakat. Bantuan teknis juga akan mencakup pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan arahan nasional pengarusutamaan jender dan penyusunan rencana dan anggaran sensitif jender.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.3.2: Permintaan OMS/LSM terhadap pelayanan yang lebih baik maupun pasokannya lebih tinggi

Kegiatan potensial di bawah 2.3.2 termasuk memperkuat peran outlet berita, termasuk media sosial, untuk menginformasikan standar minimum pelayanan dengan target tertentu kepada masyarakat, menyediakan wadah untuk menampung masukan dari masyarakat, dan sebagai wahana untuk meminta pertanggungjawaban entitas pemberi pelayanan. Intervensi akan meningkatkan kapasitas LSM / OMS agar tidak hanya memberikan pelayanan dasar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasinya, tetapi juga menjadi pengawas kuat dan mengadvokasikan peningkatan akses dan kualitas pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya dan kapasitasnya. LSM / OMS yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, air, pendidikan, termasuk pelatihan kerja, dan lingkungan akan diprioritaskan. Semua intervensi akan berfokus pada organisasi yang bekerja di tingkat lokal.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 2.3.3: Kemitraan pemerintah-swasta untuk meningkatkan pelayanan di daerah lebih luas

Sektor swasta memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap DO ini dan DO lainnya, melalui inovasi dan advokasi, standar yang tinggi untuk jasa atau produknya dan potensi untuk peningkatan skala. Kegiatan potensial di bawah Sub-IR 2.3.3 mencakup kemitraan dengan perusahaan swasta dan yayasan yang memberikan pelayanan di tingkat lokal dan pembiayaan inovatif untuk air dan sanitasi diperluas dan dipromosikan. Kemitraan kunci lainnya yang dapat mendukung indikator semua DO juga akan dikembangkan.

Bagan 4 – Tujuan Kerjasama Pembangunan 3: Gambaran Kerangka Hasil



Tujuan Kerjasama Pembangunan 3: Prioritas Pembangunan Global yang Menjadi Kepentingan Bersama Meningkatkan

Tujuan Kerjasama Pembangunan ini menargetkan beberapa prioritas pembangunan global yang akan ditangani bersama antara USAID dengan Pemerintah Indonesia. Prioritas meliputi: pengendalian penyakit menular yang menyangkut kepentingan nasional, regional, dan global, konservasi kekayaan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi, pengurangan risiko gas rumah kaca yang emisinya meningkat cepat, dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.

Dalam konteks Indonesia, tiga IR pertama di bawah DO ini merupakan bidang penting di mana tekanan internal dan eksternal akan saling memperkuat. Tekanan diplomatik oleh masyarakat internasional dapat mendukung para pemimpin Indonesia untuk memenuhi komitmen yang dinyatakan di forum internasional (Putnam, 1988). Sebagai contoh, Menteri Kesehatan Indonesia saat ini adalah Ketua Dewan Global Fund, tapi masih banyak yang harus dilakukan untuk memberantas HIV / AIDS, malaria, dan TB di Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam pemberantasan penyakit bersama negara lain secara bilateral maupun di forum internasional diharapkan dapat meningkatkan perawatan dengan standar internasional. Sebaliknya, secara politis keberhasilan di dalam negeri akan memberdayakan Indonesia untuk memimpin reformasi lintas batas yang penting di tingkat regional, yang diperlukan untuk menangani masalah ini secara global dan oleh karenanya akan memperkuat keberhasilan di Indonesia. Jika Indonesia berhasil memberantas penyakit menular, mengurangi emisi karbon, dan melestarikan

keanekaragaman hayati, maka keberhasilan masyarakat global dalam melaksanakan upaya ini juga meningkat.

Penyakit Menular, Keanekaragaman Hayati, dan Perubahan Iklim

Penyakit menular seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, penyakit kaki gajah (*lymphatic filariasis-LF*), dan pandemi influenza merupakan beban kesehatan yang serius di Indonesia. Mengingat jumlah dan mobilitas penduduk Indonesia, berbagai permasalahan kesehatan yang serius tidak hanya menjadi masalah yang berpengaruh terhadap Indonesia tetapi memiliki dampak global. Meskipun secara nasional angkanya di bawah 1 persen, prevalensi HIV masih jauh lebih tinggi pada populasi kunci yang terkena dampak: pekerja seks perempuan, laki-laki suka laki-laki (LSL), pengguna narkoba suntik, pasangan perempuan/istri dari laki-laki yang menjadi klien pekerja seks, dan waria. Prevalensi HIV tertinggi ada di Papua (2,4 persen), di mana epidemi diperparah oleh kekerasan berbasis gender. Dengan adanya industri pertambangan dan perikanan yang besar dan tingginya jumlah pekerja pendatang, Papua berpotensi menjadi sumber peningkatan penularan HIV ke wilayah sekitarnya. Perdagangan seks juga berkontribusi terhadap tingginya prevalensi HIV. Indonesia berada di urutan kelima beban TB tertinggi di dunia dan berada di antara 10 besar negara dengan tuberkulosis dengan resistensi ganda terhadap obat anti TB (MDR TB). Penyakit kaki gajah dan kecacingan (*helminthiasis*) yang menyebar melalui tanah merupakan penyakit endemik di seluruh Indonesia. 10 persen dari populasi berisiko di dunia ada di Indonesia, dengan perkiraan 125-200 juta orang berisiko terkena penyakit kaki gajah. Penyakit kecacingan yang ditularkan merupakan masalah nasional yang mempengaruhi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang masih mengalami endemi Avian influenza (AI). Virus penyakit ini masih menyebar di seluruh sektor unggas dan terus menyebabkan penyakit dan kematian pada manusia. Indonesia memiliki lebih banyak kasus AI pada manusia dan angka fatalitas kasus tertinggi dibandingkan negara lain di dunia.

Indonesia merupakan negara prioritas Pemerintah AS untuk Inisiatif Perubahan Iklim Global karena tingginya emisi gas rumah kaca (ketiga tertinggi di dunia) yang dihasilkan Indonesia, luas hutan yang signifikan untuk skala global (luas hutan tropis terbesar ketiga atau 10 persen dari luas hutan dunia) dan jumlah penduduk yang besar dan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Hutan dan laut di Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Indonesia menjadi titik fokus dunia dalam hal perlindungan spesies karismatik, terutama untuk mamalia, burung, reptil, karang, dan ikan yang mengagumkan. Tetapi dengan insentif ekonomi yang mendorong terjadinya penebangan hutan, konversi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam di darat dan di laut yang semakin meluas dan terus menerus, kelangsungan hidup berbagai spesies tersebut dan habitatnya semakin berisiko seperti tercantum dalam Daftar Merah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) untuk Indonesia (2012) yang menyatakan bahwa 5.015 spesies Indonesia berisiko mengalami kepunahan.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, baru-baru ini pemerintah dan perusahaan di Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menghadapi berbagai masalah secara holistik, yang mengharuskan diterapkannya pengelolaan yang lebih baik, adanya kepedulian yang lebih tinggi serta kerja sama yang lebih erat dengan sektor swasta agar kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutannya. Pemerintah AS dan Indonesia sepakat bahwa hutan dan ekosistem laut Indonesia merupakan kekayaan dunia dan tengah menghadapi ancaman luar biasa. Jika Indonesia gagal melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayatinya, maka kekayaan alam yang penting bagi dunia ini akan hilang dan emisi karbon dunia akan terus meningkat lebih cepat. Hubungan yang kuat antara IR 3.1 dan 3.2 - khususnya di wilayah yang juga

menjadi kepentingan dunia - perlu diantisipasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan bentang alam secara berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati darat.

Kemajuan dalam mencapai kepentingan pembangunan yang telah disepakati akan menjadi barometer penguatan dan arah kemitraan USAID, mencerminkan bagaimana AS dan Indonesia secara bersama-sama berinteraksi pada skala global. Pengakuan bahwa Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang mulai muncul dan menjadi negara terkemuka di tingkat global, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC) telah dimasukkan sebagai upaya pelengkap dalam DO ini. AS memiliki minat untuk memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai mitra donor yang efektif, relevan dan saling menguntungkan.

Dampak tambahan dari penguatan kemitraan dan investasi bersama di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan akan meningkatkan hubungan bilateral dan mengarah pada transformasi ekonomi dan sosial. Dampak yang dihasilkannya akan memberikan sumbangan yang besar terhadap target global dalam mengendalikan TB dan MDR TB, menyelamatkan ribuan jiwa, mempertahankan jutaan hektar garis pantai dan hutan, meningkatkan pengelolaan habitat darat dan laut untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko bencana yang disebabkan perubahan iklim dan bencana alam serta meningkatkan akuntabilitas Indonesia sebagai anggota masyarakat global.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.1: Pengendalian Penyakit Menular Penting di Tingkat Regional dan Global Meningkat

IR ini akan berupaya memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia dan kapasitasnya untuk berpartisipasi dalam upaya regional/global dalam pengendalian penyebaran penyakit menular dan pencegahan wabah epidemi terutama HIV/AIDS, TB dan MDR TB, pandemi influenza, ancaman pandemi yang baru muncul, serta penyakit tropis terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*). Indonesia harus mampu merespon ancaman penyakit menular dengan cara yang efektif dan melindungi kesehatan warga negaranya. Indonesia juga siap untuk memainkan peran terdepan di tingkat regional maupun global dalam pencegahan, pengendalian, dan respon terhadap ancaman penyakit menular. Bantuan Pemerintah AS termasuk mengembangkan dan menguji pendekatan dan teknologi terkini yang dapat direplikasi di tingkat regional dan global untuk meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan surveilans terhadap ancaman penyakit menular.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.1.1: Standar dan norma internasional pengendalian penyakit diadopsi

Pemerintah AS mendukung dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dan global untuk menangani dan merespon ancaman penyakit serta mendorong penggunaan standar internasional pengobatan penyakit (terutama untuk TB, influenza dan infeksi pernafasan akut, pengendalian NTD, kesehatan ibu dan anak, dan HIV). Kegiatan yang potensial dalam sub-IR ini termasuk memberikan bantuan teknis kepada berbagai kementerian dan pelaku pembangunan. Kegiatan ini termasuk: bantuan kepada produsen farmasi lokal untuk mendapatkan pra-kualifikasi WHO agar dapat memproduksi obat TB lini kedua yang dapat membantu mengatasi kekurangan obat esensial ini di tingkat global, bantuan kepada Kementerian Kesehatan untuk menerapkan kebijakan global pemberian obat cacing dan meluncurkan sebuah strategi nasional obat cacing pada anak, meningkatkan penerapan Standar Internasional Pengobatan TB di antara penyedia pelayanan kesehatan sektor pemerintah dan swasta, dan memberikan dukungan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk meningkatkan laboratorium *biosafety* kesehatan. Terakhir, dukungan teknis akan diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian yang akan mengisolasi karakter *strain* influenza melalui standar dan praktek internasional dan pada saat yang sama melakukan

penelusuran virus influenza yang berpotensi mengakibatkan pandemi dan mengembangkan vaksin yang efektif.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.1.2: Kapasitas pencegahan, surveilans dan perawatan meningkat

Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Indonesia dirasa sangat penting jika ingin mencapai target global. Pemerintah AS memberikan dukungan yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan Indonesia memantau, mencegah, dan mengobati penyakit menular yang menyangkut kepentingan global. Kegiatan dalam sub-IR ini mencakup bantuan teknis untuk memperbaiki kapasitas diagnosis di laboratorium dan meningkatkan kapasitas lokal untuk meningkatkan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan influenza dan penyakit yang baru muncul, HIV, serta TB. Untuk beberapa NTD tertentu, Pemerintah AS akan menyediakan dukungan teknis untuk: upaya pengendalian dan pemberantasan sesuai dengan standar internasional; memperkuat kapasitas epidemiologi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, dan sektor akademik untuk memberi respon jika terjadi wabah, memperkuat diagnosis, penanganan, dan pengobatan TB, termasuk MDR-TB dan HIV-TB, meningkatkan ketersediaan dan penggunaan terapi oksigen, penyusunan panduan pelatihan baru serta memperbaiki serta mengganti peralatan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan akut berat.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.1.3: Keterlibatan dalam dialog kesehatan kunci tingkat global lebih kuat

Investasi Pemerintah AS melibatkan para tokoh kesehatan Indonesia dalam dialog tingkat global tentang inisiatif strategis dan penyusunan kebijakan yang akan memotivasi para penyusun kebijakan di Indonesia untuk berkomitmen dan menjamin program pengendalian berkualitas melalui keterlibatan dengan rekan sejawatnya di bidang teknis. Keterlibatan Indonesia di tingkat internasional akan memberikan pemahaman dan pengalaman berharga bagi negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Bentuk keterlibatan ini dapat berupa keanggotaan dalam kemitraan teknis global seperti Kemitraan Stop TB, kelompok kerja TB WHO dan Aliansi Global untuk Memberantas Penyakit Kaki Gajah. Kepemimpinan dan komitmen Indonesia akan bermanfaat untuk upaya pemberantasan NTD dan kepatuhan terhadap standar global pengendalian penyakit.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.2: Pelestarian Keanekaragaman Hayati Laut dan Darat

IR ini akan mengembangkan pemberian insentif yang kuat untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan tata kelola yang lebih baik serta peraturan untuk mengendalikan ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati dan penyebab kerusakan habitat (USAID / Indonesia, 2013b). Dalam ekosistem ini - khususnya terumbu karang dan hutan hujan tropis - secara umum Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di bumi. Tapi pembangunan Indonesia yang mengandalkan sumber daya alam selama beberapa dekade, menyebabkan perubahan tata guna lahan secara besar-besaran dan praktik penangkapan ikan berlebihan. Hal yang sama juga mengakibatkan kerusakan ekosistem penting yang tidak dapat diperbaiki dan tidak hanya berakibat pada orangutan, harimau, badak, gajah, hiu, pari, dan spesies karismatik lainnya, tetapi juga untuk hewan kecil dan tanaman yang endemik dan/atau yang cukup banyak terdapat di Indonesia dan unik bagi dunia.

Berdasarkan evaluasi atas program kehutanan dan kelautan USAID yang masih berlangsung di Indonesia (USAID/Indonesia, 2012b, 2013e), dan melalui penerapan pengalaman praktik terbaik internasional yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, USAID telah mengidentifikasi daerah yang memungkinkan tercapainya kemajuan konservasi yang tinggi. Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, industri perikanan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, USAID akan

mengatasi ancaman utama akibat penangkapan ikan yang berlebihan karena peraturan yang belum memadai, penegakan hukum yang lemah, praktik penangkapan ikan yang tidak memperhatikan keberlanjutannya, serta sistem yang belum kokoh. Berdasarkan pembelajaran dari strategi saat ini, perlu perombakan besar atas tata kelola dan struktur insentif bagi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan yaitu dengan menggunakan pendekatan tata kelola laut yang mencakup wilayah laut dan pesisir dan melakukan kegiatan di mana ada persaingan kepentingan antara masyarakat setempat, sektor swasta, pemerintah daerah dan pusat.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.2.1: Diterapkannya nilai-nilai ekonomi berkelanjutan yang lebih baik

Perlu disepakati nilai-nilai yang memperhatikan ekonomi berkelanjutan untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut dan darat. Pembangunan perlu memperhatikan peningkatan ekonomi agar dapat mengatasi ancaman langsung terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan prioritas pembangunan yang lebih menekankan pada keuntungan ekonomi melalui ekstraksi sumber daya alam tanpa memperhatikan perlindungan atau kelestarian ekosistem. Untuk mencapai sub-IR ini, kegiatan potensial yang dapat dilakukan meliputi penyediaan insentif konservasi dengan cara: mengembangkan model yang sesuai yang memperhatikan pendapatan, pembiayaan, dan aspek keberlanjutannya, seperti imbalan yang adil untuk jasa lingkungan, ekowisata dan pengelolaan serta konsesi restorasi; memberdayakan kepemimpinan perempuan dalam penyusunan strategi ekonomi berkelanjutan; mendorong pengembangan usaha pemerintah, swasta dan masyarakat yang inklusif, dan mendukung keberlanjutan prakarsa internasional seperti Dewan Pengawas Kelautan (*Marine Stewardship Council/MS*C). Kegiatan yang bisa memberikan gambaran di antaranya adalah memperkuat paket peraturan untuk transparansi; tata kelola perikanan dan tata guna hutan/lahan berbasis data (misalnya, peraturan, perizinan, dan penegakannya), memperkuat pemantauan, pengendalian di pelabuhan, dan survei tangkapan dan pergerakan ikan; mengurangi penangkapan ikan ilegal, mengurangi pembalakan liar, mendukung peningkatan skema sertifikasi kelautan dan darat berkelanjutan, dan meningkatkan penegakan peraturan pengelolaan hutan dan kelautan. Terakhir, untuk memaksimalkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dari ekosistem hutan/bakau, habitat pesisir, dan perikanan karang dekat pantai bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, USAID akan melakukan investasi dalam upaya yang mengoptimalkan nilai tambah dan kontribusi modal alam dari pemanfaatan sumber daya alam darat dan laut secara berkelanjutan, pengolahan hasil alam, dan pemasaran bagi masyarakat, khususnya melalui penguatan keterlibatan dengan sektor swasta.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.2.2: Ancaman terhadap keanekaragaman hayati menurun

Untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut dan darat secara efektif, kegiatan di bawah sub-IR ini akan menangani ancaman langsung dan tidak langsung yang telah diidentifikasi melalui Analisis Keanekaragaman Hayati dan Hutan Tropis, laporan pemilihan lokasi dan analisis di tingkat kegiatan yang banyak dilakukan baru-baru ini dengan fokus intervensi pada ekosistem keanekaragaman hayati darat dan laut yang memiliki nilai konservasi tinggi. Ancaman mencakup konversi daerah laut dan pesisir yang berlangsung semakin cepat, ekstraksi sumber daya darat dan laut yang merusak dan tidak mempertimbangkan keberlanjutannya, korupsi dan lemahnya penegakan hukum, serta tidak memadainya kapasitas pemerintah. Kegiatan utama akan dilakukan berdasarkan investasi yang telah terbukti berhasil dan pembelajaran sebelumnya seperti: dukungan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) dan nasional untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan praktik yang melestarikan keanekaragaman hayati, dukungan kepada LSM dan OMS yang mempromosikan transparansi pemerintah daerah, pembangunan masyarakat, hak daerah, dan diversifikasi pendapatan melalui pengelolaan sumber daya laut dan darat berbasis masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya, tata kelola bentang alam dan laut secara terpadu, perencanaan tata ruang dan

pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, integrasi pemetaan dan data, dan pemantauan data biofisik. Selanjutnya, komponen penting untuk kegiatan ini adalah meningkatkan pengelolaan kawasan lindung baik oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah terkait, dan masyarakat, serta memastikan manajemen yang melindungi peran dan kepentingan laki-laki dan perempuan di daerah yang terkena dampak.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.2.3: Keterlibatan dalam dialog penting tentang pelestarian lebih kuat

Komponen penting dalam meningkatkan keanekaragaman hayati laut dan darat adalah dengan memperkuat keterlibatan Pemerintah Indonesia dan/atau sektor yang kurang terwakili di forum konservasi internasional. Untuk mencapai sub-IR ini, kegiatan akan mencakup perluasan partisipasi Indonesia dalam dialog di tingkat nasional dan internasional serta pertukaran informasi teknis tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya, akan dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas para mitra untuk berkomunikasi tentang permasalahan konservasi keanekaragaman hayati yang menyangkut kepentingan global. Berbagai upaya tersebut memungkinkan Indonesia untuk muncul sebagai pemimpin dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati, dan juga memberikan pengalaman berharga dan wawasan untuk negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.3: Menurunnya Risiko dan Meningkatnya Ketahanan terhadap Perubahan Iklim untuk Mendukung Ekonomi Hijau

IR ini berupaya mengurangi dampak pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat terhadap peningkatan emisi karbon dan upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim global. Sebagai negara penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki kepentingan yang kuat dalam pengendalian emisi karbon. Meningkatnya produksi energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Wolde-Rufael, 2004) akan mempercepat naiknya emisi karbon Indonesia dibandingkan dengan konversi hutan dan lahan gambut kecuali terjadi pergeseran kebijakan besar-besaran dan ada peningkatan iklim investasi pembangunan untuk mendorong transformasi peningkatan efisiensi energi, produksi energi terbarukan, manajemen energi yang efisien, dan solusi transportasi bersih dan cerdas. Di negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akan menyebabkan peningkatan variabilitas dan perubahan iklim yang akan menghambat kemajuan pembangunan karena cuaca ekstrem lebih sering terjadi, seperti banjir dan tanah longsor; selain itu ada dampak lain yang terjadi belakangan ini seperti peningkatan keasaman laut dan kenaikan permukaan laut. Bencana alam terkait dengan lokasi geografis Indonesia di wilayah Cincin Api dapat memperparah dampak fenomena ini dan merusak pembangunan sosial dan ekonomi secara luas. Khalayak yang lebih luas perlu lebih memahami hubungan antara emisi gas rumah kaca dan dampaknya terhadap perubahan iklim agar pembangunan Indonesia lebih memperhatikan konservasi dan mengurangi emisi. Pemerintah Indonesia mengakui adanya kebutuhan untuk mengatasi ancaman global ini, tetapi hingga saat ini upaya yang dilakukan masih tentatif dan belum tegas dikaitkan dengan undang-undang dan pelaksanaan yang seharusnya dapat memastikan tercapainya target yang telah dihitung dan didefinisikan dengan seksama. Kegiatan lima tahun ke depan akan membangun dasar untuk menentukan arah jejak karbon Indonesia di masa depan jika kemajuan pembangunan rendah emisi yang signifikan dapat dicapai.

IR ini mencakup tata kelola sumber daya alam di seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat sipil, khususnya pada masyarakat yang terpengaruh oleh perubahan iklim global. Yang juga penting adalah kegiatan sektor swasta untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak negatif terhadap bentang alam yang kaya karbon, seperti hutan tropis, lahan gambut, dan hutan bakau. Fasilitasi investasi energi bersih, terutama dalam produksi energi terbarukan, efisiensi energi, dan

transportasi bersih sangat penting untuk dilakukan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan di bawah IR ini memberikan kontribusi terhadap perjanjian AS-Indonesia untuk Peningkatan Kapasitas Strategi Pembangunan Rendah Emisi (*Enhancing Capacity in Low Emissions Development Strategies/EC-LED*).

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.3.1: Landasan sistem energi rendah karbon lebih kuat Indonesia merupakan salah satu dari 20 negara EC-LEDS yang bekerja bersama USAID di tingkat global dan menggarisbawahi pentingnya memperkuat upaya pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau. Strategi ini menegaskan hal ini sebagai tantangan pembangunan untuk kepentingan bersama kedua negara. Di bawah sub - IR ini, kegiatan potensial yang dapat dilakukan adalah fasilitasi inisiatif energi bersih seperti membangun kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber daya dan melaksanakan rencana pembangunan energi rendah karbon berbasis data dan terpadu sesuai hukum dan mandat yang dimilikinya. Potensi kegiatan termasuk dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam menyusun pedoman pelaksanaan, mekanisme pendanaan, standarisasi, pemantauan, koordinasi, dan skema untuk mendorong investasi pembangunan yang dapat mengurangi hambatan, dan memberikan insentif untuk pengembangan energi terbarukan. Kegiatan tersebut dapat mengatasi solusi berbasis bahan bakar fosil, mendorong investasi efisiensi energi untuk membantu menurunkan konsumsi energi secara keseluruhan dan pelaksanaan solusi transportasi bersih yang secara langsung dapat mengurangi emisi. Dukungan teknis dan pelatihan akan diberikan kepada penyusun proyek lingkungan, perusahaan penghasil energi, pihak pemerintah dengan kewenangan yang tepat, bank swasta, dan lembaga keuangan pemerintah agar dapat mempersiapkan dan mengkaji proposal teknis tentang proyek energi terbarukan dan efisiensi energi yang berkualitas, dan layak menurut perspektif finansial. Bantuan teknis yang akan diberikan oleh USAID termasuk untuk menyusun pendekatan pendanaan, instrumen, dan produk yang dapat membantu menyalurkan dana dari pemerintah, sektor swasta, dan donor untuk memfasilitasi investasi di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi. Upaya komunikasi bertujuan mengubah perilaku tentang energi bersih, memahami permasalahan lingkungan, pendekatan rendah karbon serta reformasi subsidi dan permasalahan kebijakan energi kunci lainnya yang secara langsung berdampak terhadap pengembangan energi bersih. Terakhir, kegiatan potensial akan mencakup pengembangan kemitraan dan pertukaran teknis dengan universitas AS dan Indonesia, para pemikir, asosiasi perdagangan, lembaga penelitian, perusahaan energi dan sumber daya, dan sektor swasta. Fokus kegiatan akan ditekankan pada alih ilmu dan praktik terbaik serta penyebarluasan teknologi baru tentang energi bersih yang sudah terbukti berhasil dan siap dipasarkan. Kerjasama pelatihan dan pengembangan kapasitas lembaga lokal akan diberikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, data, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.3.2: Tata guna lahan rendah karbon dan kepemimpinan di bidang kehutanan meningkat

Sub-IR ini memperkuat mitigasi perubahan iklim dengan melindungi dan mengelola hutan untuk mendukung penggunaan bentang alam yang mempertahankan kelestariannya dan penggunaan lahan untuk upaya pembangunan rendah karbon. Kegiatan potensial termasuk mengarahkan insentif yang sebelumnya ditujukan untuk upaya yang terbatas, saat ini akan diarahkan untuk mendorong upaya lain yang mendukung konservasi. Bentuk inisiatif untuk mengubah paradigma di masyarakat dan Pemerintah Indonesia, serta praktik yang dilaksanakan perusahaan akan serupa dengan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati dalam DO ini, dan meliputi: pengembangan model yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi dampak, mendorong pembiayaan untuk pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan, mendorong kegiatan ekonomi hijau seperti imbalan yang adil untuk pelayanan ekosistem, ekowisata, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, konsesi restorasi hutan, mengkatalisasi perluasan inisiatif internasional yang mendukung keberlanjutan lingkungan, dan

memaksimalkan inisiatif nilai konservasi dalam negeri yang secara sukarela harus dipatuhi oleh semua industri yang mengandalkan sumber daya alam. Terakhir, kegiatan yang akan dilakukan mencakup mekanisme yang mendukung partisipasi masyarakat - terutama yang mengakui dan memperkuat kepemimpinan perempuan di sektor ini - untuk proses pengambilan keputusan penggunaan lahan di daerah. Adopsi pemanfaatan IPTEK oleh Pemerintah Indonesia seperti penginderaan jarak jauh untuk memantau perubahan luas tutupan hutan, akan difasilitasi untuk meningkatkan pemanfaatan data ilmiah dan forensik dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.3.3: Adaptasi terhadap perubahan iklim dan manajemen risiko meningkat

Salah satu komponen penting dalam memperkuat pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim adalah dukungan bagi upaya adaptasi, termasuk perluasan kajian tentang kerentanan dan adaptasi perubahan iklim dan pada saat yang sama mendukung pelaksanaan rencana aksi di masyarakat dan kabupaten/kota. Data menunjukkan bahwa bencana terkait iklim meningkat, dan mempersiapkan masyarakat berarti meningkatkan ketahanan fisik dan ekonomi. Potensi kegiatan di bawah sub-IR ini adalah memberikan dukungan lembaga Pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyusun rencana kesiapan menghadapi bencana yang sensitif gender. USAID akan melibatkan lembaga pemerintah yang menangani manajemen bencana, pemerintah di kota yang rentan, lembaga penelitian, dan universitas di provinsi untuk menyediakan pelayanan teknis yang akan memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dan mengarahkan tindakan perubahan untuk adaptasi iklim. Bermitra dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), donor lain, dan LSM, USAID/Indonesia akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak perubahan iklim dan mengerahkan sumber daya dan dukungan untuk adaptasi dan tindakan ketahanan menghadapi risiko perubahan iklim. Terakhir, upaya yang saling terkait erat akan dilakukan sehubungan dengan pengurangan risiko bencana bersama Pemerintah Indonesia yaitu merancang, mengembangkan dan melaksanakan *Global Flash Flood Guidance System*, sistem yang lengkap dari awal hingga akhir yang menyediakan data dan informasi, analisis, komunikasi, dan protokol yang dapat memberikan peringatan yang akurat dan tepat mengenai perkiraan waktu datangnya banjir bandang.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.3.4: Keterlibatan dalam dialog utama tentang adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim lebih kuat

Investasi pembangunan Pemerintah AS akan meningkatkan kapasitas para tokoh perubahan iklim di Indonesia untuk mengkomunikasikan perubahan iklim global dan ketahanan terhadap bencana dalam bentuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Kegiatan potensial termasuk memotivasi para penyusun kebijakan di Indonesia untuk berkomitmen dan menjamin program kendali mutu melalui keterlibatan dengan rekan-rekan internasional di bidang teknis. Para tokoh tersebut juga akan memungkinkan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, untuk belajar dari pengalaman Indonesia yang cukup banyak di bidangnya.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.4: Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Pemerintah Indonesia Lebih Kuat

Saat Indonesia terus mendapatkan manfaat dari bantuan kerjasama pembangunan, Indonesia juga diam-diam memulai programnya sendiri untuk memberikan bantuan kepada negara lain (USAID/Indonesia, 2013d). Selama 10 tahun terakhir, Pemerintah Indonesia diperkirakan telah memberikan sekitar 42 juta dollar AS dalam bentuk program Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC). Selain kerjasama teknis, Indonesia telah memberikan lebih dari 8 juta dollar AS untuk bantuan kemanusiaan dalam dua tahun terakhir saja. Indonesia memberikan bantuan kepada Jepang saat

gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011, kepada Australia setelah banjir di Queensland (News.com.au, 2011), kepada Selandia Baru setelah gempa di Christchurch (Kedutaan Besar Selandia Baru, 2011) serta kepada Haiti (Antara News, 2010), Pakistan (Rogers, 2010), Turki (Nugroho et al, 2011) dan lain-lain. Dari 8 juta dollar AS tersebut, Indonesia secara kumulatif telah memberikan 3,1 juta dollar AS dalam bentuk hibah kepada enam negara ASEAN yang terkena dampak banjir di tahun 2011. Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia memberikan 1 juta dollar AS kepada Pemerintah Filipina untuk para korban topan Bopha (Antara News, 2012).

SSTC memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memperkuat kerjasama sebagai sarana untuk memanfaatkan kesempatan bersama, promosi kemandirian regional, percepatan pembangunan, dan memperkuat solidaritas antar negara. SSTC Indonesia diperkirakan akan memprioritaskan pembangunan ekonomi yang mendorong perdagangan internasional dan memperkuat diplomasi internasional. Untuk melaksanakan dokumen Strategi *Grand Design* SSTC Pemerintah Indonesia (2011-2025), empat gugus tugas di bawah Tim Koordinasi Nasional Indonesia telah dibentuk: (1) kerangka hukum dan kelembagaan, (2) mekanisme pendanaan, (3) penyusunan program, dan (4) monitoring dan evaluasi serta sistem informasi. Baik Pemerintah Indonesia maupun donor internasional menyambut baik minat AS untuk meningkatkan kapasitas Indonesia sebagai negara pemberi bantuan.

Indonesia yang kokoh merupakan mitra regional dan global yang semakin berpengaruh, berminat pada permasalahan bersama yang dihadapi AS dan Indonesia seperti demokrasi, kemandirian regional, perdamaian, dan stabilitas. Indonesia dapat mengemuka sebagai model pendekatan demokrasi inklusif untuk dunia Islam, berperan sebagai mediator perdamaian dalam berbagai konflik internasional, serta bertindak sebagai mitra dialog antara dunia Islam dan Barat. Indonesia juga dapat memprakarsai tercapainya perempuan dan anak perempuan dalam upaya diplomatik, keamanan, dan pembangunan sebagai penerima manfaat dan sebagai agen perdamaian, rekonsiliasi, pembangunan, pertumbuhan, dan stabilitas, seperti yang juga menjadi komitmen Pemerintah AS dalam Rencana Aksi Nasional untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.

Dukungan USAID melalui IR ini akan meletakkan dasar untuk membantu lahirnya Badan Pembangunan Internasional Indonesia ("Indo Aid"), yang menjadi peninggalan yang dapat berlanjut setelah lebih dari 60 tahun kemitraan bilateral AS dan Indonesia. Ada peluang untuk mengkoordinasikan kegiatan kerjasama triangular antara program bantuan bilateral USAID/Indonesia dengan program bantuan regional di bawah USAID/RDMA (dan hubungan dengan donor lainnya yang juga mulai berkembang di Asia). "Indo Aid" yang saat ini dalam tahap usulan dapat mengambil tanggung jawab atas semua kerja sama dan bantuan pembangunan internasional dari Indonesia untuk negara lain, mengkoordinasikan perumusan kebijakan kerjasama pembangunan Indonesia dan memastikan sinergi bantuan dalam kerjasama tersebut.

IR ini mendukung peran Indonesia sebagai negara terkemuka dan donor yang baru muncul serta mencerminkan cara-cara baru melakukan upaya pembangunan. Tapi hal tersebut tidak hanya dikhususkan untuk mendukung tiga bidang yang menjadi perhatian global dalam tiga IR yang pertama. IR ini membahas komponen penting dari Kerangka Hasil keseluruhan yang merupakan kemitraan antara AS dan Indonesia dalam mencapai prioritas pembangunan; investasi pembangunan di bawah strategi ini merupakan kelanjutan model hubungan tradisional antara donor- penerima bantuan. Upaya untuk mencapai prioritas ini akan menghasilkan dampak keseluruhan yang lebih besar dan mencerminkan transformasi hubungan AS-Indonesia serta pertautan upaya pembangunan dan diplomasi. Indonesia telah menerima permintaan bantuan dari puluhan negara di seluruh dunia, dan cara Indonesia memberikan tanggapannya merupakan hal yang penting. AS dalam kebijakan luar negerinya

mempunyai minat yang besar untuk membantu Indonesia menjadi mitra donor yang efektif dan relevan. Indonesia juga akan mendapatkan manfaat di dalam negeri dan pada saat yang sama menampilkan upaya internasional, menggambarkan pentingnya kerjasama antara tiga negara melalui pencapaian DO ini.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.4.1: Kapasitas Tim Koordinasi Nasional dan lembaga pelaksana meningkat

Untuk memperkuat kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Pemerintah Indonesia, USAID melihat pentingnya meningkatkan kapasitas tim koordinasi nasional, lembaga pelaksana dan organisasi yang turut dalam kerja sama tersebut. Kegiatan spesifik termasuk membentuk program pertukaran staf profesional antara USAID/Indonesia dan Tim Koordinasi Nasional Pemerintah Indonesia dimana dua lembaga saling bertukar salah satu anggota staf untuk berbagi keahlian dan bekerjasama memfasilitasi pembelajaran sebagai sesama rekan mengenai praktik terbaik sebagai donor. Selanjutnya, kegiatan akan mencakup studi banding mengenai badan pembangunan lain, mempelajari struktur tata kelola pemerintahan, kerangka kerja legislatif dan pengaturan kelembagaan di negara lain. Berbagai kegiatan tersebut akan membantu mengembangkan legislasi yang menjadi dasar hukum kerjasama pembangunan selanjutnya. Peraturan perundangan secara jelas menetapkan komitmen negara untuk kerjasama pembangunan, tujuan umum Bantuan Pembangunan Luar Negeri (*Overseas Development Assistance/ODA*) dan pelaksanaan, pertanggungjawaban, peran dan hubungan antar kementerian dan para pelaku kerjasama pembangunan lainnya.

Kegiatan yang potensial untuk sub-IR ini akan mencakup bantuan teknis kepada Tim Koordinasi Nasional untuk menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia yang akan menarik minat dan mempertahankan tenaga profesional berkualitas yang berpartisipasi penuh-waktu dalam kerjasama pembangunan dan untuk Pemerintah Indonesia dengan tujuan membangun sistem pemantauan dan evaluasi independen yang mantap serta sesuai dengan standar internasional. Program yang diusulkan akan mencakup penguatan data statistik dan pelaporan bantuan pembangunan Indonesia, bantuan kepada lembaga pemerintah untuk koordinasi, pemantauan, efisiensi dan evaluasi dampak bantuan. Hal ini mencakup kemitraan internasional untuk persiapan dan pelaksanaan program universitas tentang bantuan pembangunan yang diperlukan untuk mendidik praktisi pembangunan masa depan.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 3.4.2: Kerjasama Triangular dengan Pemerintah AS lebih kuat

Komponen lain yang penting untuk memperkuat kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular adalah memperluas kerjasama segitiga dalam kemitraan dengan pemerintah. Hal ini akan mencakup identifikasi program kerjasama trilateral di negara ketiga yang akan dirancang dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat bekerja sama dengan negara penerima. USAID akan menjadi lembaga Pemerintah AS dalam memprakarsai program tersebut, lembaga lain juga diharapkan dapat berpartisipasi. Berbagai program tersebut akan berada di wilayah di mana ketiga negara memiliki kepentingan bersama, seperti mempromosikan air bersih dan sanitasi, menurunkan penyakit menular, atau memerangi kekerasan berbasis gender. Sebagian besar mungkin akan dilaksanakan di wilayah Asia, tapi inisiatif di tempat lain, seperti mendorong demokrasi di Timur Tengah, juga akan dipertimbangkan. Kegiatan potensial lainnya dapat mencakup bantuan untuk mendirikan Dana "Indo Aid" dalam anggaran nasional dengan alokasi di DPR. Dana yang dialokasikan untuk program seperti ini juga bisa berasal dari pemerintah asing - untuk kerjasama trilateral - dan juga kontribusi sektor swasta / organisasi amal. Dana akan digunakan untuk kerja sama pembangunan dan pembiayaan bantuan, remunerasi dan insentif dewan pengurus lembaga tersebut.

Bagan 5 – Tujuan Kerjasama Pembangunan 4: Gambaran Kerangka Hasil



Tujuan Kerjasama Pembangunan 4: Kerjasama di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Meningkatkan

Meskipun Indonesia mempunyai prospek pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-negara lain dalam investasi untuk penelitian dan pengembangan (litbang). Bahkan Indonesia mengalokasikan kurang dari 0,08 persen dari PDB untuk investasi litbang - kurang dari 1/10 rata-rata dari ekonomi negara BRIC (Brasil, Rusia, India dan China) (Bank Dunia, 2012b). Demikian pula bahwa Indonesia kurang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk memajukan tujuan-tujuan pembangunan dan daya saing global. Melihat kenyataan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagai salah satu prioritas utama sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap Kedua (2010-2014) dan Ketiga (2015-2019) (Pemerintah Indonesia, 2010).

Melihat posisi Indonesia yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah lainnya dalam peringkat global seperti Indeks Inovasi Global (100 dari 141) (INSEAD dan WIPO, 2012), Indeks Pengetahuan Ekonomi (108 dari 143) (Bank dunia, 2012b), dan Index Daya Saing Global (50 dari 144) (Schwab, 2012), maka pengetahuan dan kinerja inovasi Indonesia perlu ditingkatkan. Lebih banyak upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah ilmuwan, publikasi,

paten, dan alokasi dana litbang. Seperti negara-negara lain di seluruh dunia, sangat sedikit perempuan yang terlibat dalam kegiatan IPTEK dan inovasi di Indonesia. Harus lebih banyak upaya dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan dilibatkan dalam bidang ini dan juga perlu dilakukan penambahan investasi untuk membantu perempuan dan anak perempuan, terutama kelompok miskin.

Tabel 1: Matrik ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi Indonesia dibandingkan dengan ekonomi BRIC

	Indonesia	Brazil	Russia	India	China
Penelitian dan pengembangan sebagai % PDB	0,08	1,17	1,25	0,76*	1,70
Peneliti per juta warga negara	90	668	3.091	136*	863
Pengajuan paten	437	3.921	25.598	7.262	229.096
Artikel di jurnal ilmiah dan teknis	262	12.306	14.016	19.917	74.019

Sumber: Bank Dunia, 2012a. *Data 2007

Tantangan lain adalah sistem pengetahuan, kerjasama internasional, pemanfaatan data dan teknologi menghambat kemajuan di sektor-sektor kunci dalam pembangunan termasuk lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang IPTEK akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Laporan Harvard tahun 2010 menyatakan bahwa terbelakangnya status ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasinya, Indonesia rentan terhadap hilangnya pekerjaan padat karya dan warga negara paling berbakat ke negara-negara lain karena kurangnya investasi dan lapangan pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi. *McKinsey* dan *Boston Consulting Group* mengutip temuan serupa dan melaporkan bahwa Indonesia akan mengalami kekurangan calon ilmuwan dengan kualifikasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknis dalam jumlah besar pada dekade mendatang (Oberman et al, 2012; Tong et al, 2013). Menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), meskipun ada beberapa universitas penelitian, belum ada satu pun universitas dalam negeri berkelas dunia yang mampu menarik sumber daya manusia berbakat dari luar negeri - suatu faktor penting dalam meningkatkan pembangunan di berbagai bidang (2010).

Semua dosen di Indonesia harus memenuhi setidaknya tiga kewajiban: mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat. Sebagian besar memilih untuk mengajar sebagai pekerjaan utama, sebagai upaya untuk menambah penghasilan yang tidak mencukupi. Selain itu, banyak dosen memiliki tanggung jawab ganda mengelola institusinya, sehingga kualitas pengelolaan keuangan dan organisasi merosot, serta kualitas pengajaran menurun. Saat ini sudah ada beberapa universitas terkemuka, seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, dan Institut Teknologi Bandung. Berbagai institusi tersebut telah memiliki program kerjasama dengan perusahaan swasta dan universitas lainnya melalui penelitian dan pengembangan produk yang inovatif. Mengingat bahwa jumlah lembaga pendidikan tinggi yang terdaftar di Indonesia berjumlah lebih dari 3.000, sementara fakta menunjukkan bahwa hanya ada empat universitas terkemuka yang memiliki kaliber internasional, maka potensi perguruan tinggi yang dimiliki Indonesia masih sangat besar.

Publikasi ilmiah, yang merupakan tolok ukur keilmuan, yang diterbitkan oleh ilmuwan dan peneliti Indonesia juga tidak banyak. Meskipun jumlah publikasi bersama secara keseluruhan telah meningkat sejak 2008, Indonesia terus tertinggal dalam hal penulisan dokumen referensi dan publikasi di jurnal internasional papan atas (Faisal, 2012). Universitas dan peneliti di Indonesia memerlukan akses terhadap pengetahuan global dan peningkatan kapasitas untuk terlibat dalam diskusi ilmiah di tingkat global. Meningkatkan interaksi antara ilmuwan Indonesia dan mitra peneliti di luar negeri akan

meningkatkan akses terhadap teknik dan metodologi terkini, dan kapasitas Indonesia secara keseluruhan untuk melakukan penelitian ilmiah (Latikan et al 2012) meningkat. *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* PBB (UNESCO) berpendapat bahwa Indonesia harus lebih meningkatkan kerjasama internasional (2011). Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) mendorong publikasi penelitian di jurnal elektronik dan cetak terakreditasi, dan mengaitkannya dengan tunjangan profesi dan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris.

Indonesia berada di dalam daftar 20 negara teratas yang mengirimkan warga negaranya untuk belajar di AS. Pada tahun akademik 2010-11, kurang dari 7.000 mahasiswa Indonesia mengikuti kuliah di universitas AS, sementara sekitar 200 orang Amerika belajar di Indonesia. Sebagai perbandingan, pada tahun ajaran yang sama, lebih dari 150.000 mahasiswa Cina belajar di Amerika Serikat dan 15.000 mahasiswa Amerika belajar di Cina (IIE, 2012). Peningkatan jumlah pertukaran ilmuwan, mahasiswa, *fellows*, dan program magang - dari dua belah pihak - merupakan tujuan utama Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia dan menjadi prioritas bagi USAID. Kementerian Negara Riset dan Teknologi (RISTEK) menunjukkan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah mengirim warga negara Indonesia ke AS untuk memperoleh gelar yang lebih tinggi. Hanya sekitar 16 persen dari semua peneliti di lembaga yang ada di Indonesia (pendidikan tinggi, pemerintah, industri) memiliki gelar doktor (Ha et al, 2011). Prioritas RISTEK lainnya termasuk kemitraan dalam penelitian kesehatan, pertanian, lingkungan, dan keanekaragaman hayati serta memperkuat investasi penelitian melalui peningkatan proses pemberian hibah dan pengadaan, dan pemanfaatan data ilmiah dalam kebijakan dan program. Dalam berbagai bidang tersebut RISTEK mengundang USAID untuk membantu penyusunan strategi jangka menengah IPTEK berikutnya. USAID memiliki kesempatan untuk mendorong integrasi IPTEK dalam strategi dan prioritas kementerian lain (khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk meningkatkan "ekosistem" IPTEK dan inovasi di Indonesia.

Indonesia mempunyai peluang luar biasa untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dengan membangun sumber daya manusia sebagai modal dasar. Indonesia dapat memperluas kesempatan bagi siswa dan peneliti perempuan yang berbakat, meningkatkan investasi Pemerintah Indonesia dan kesiapan kerjasama dengan mitra internasional untuk meningkatkan prestasinya. Pada 2010, AS dan Indonesia menandatangani kesepakatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diikuti dengan penyelenggaraan Rapat Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bersama pada tahun 2012. Selanjutnya komite ini akan mengadakan pertemuan setiap dua tahun. Ilmu pengetahuan merupakan komponen yang dominan dari Kemitraan Komprehensif di mana diplomasi dan pembangunan terintegrasi secara efektif. Ada komitmen yang kuat dari kedua negara untuk meningkatkan kerjasama ini.

USAID berada pada posisi yang baik untuk mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di Indonesia dengan memberikan masukan sebagai katalis yang akan berdampak terhadap seluruh ekosistem ilmiah. Program USAID akan membantu lembaga-lembaga dan pemimpin daerah; yang pada akhirnya berkontribusi untuk memajukan pembangunan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang memenuhi standar internasional. DO ini membantu ilmuwan, mahasiswa, institusi pendidikan tinggi, dan sektor swasta yang memiliki potensi untuk membangun Indonesia yang mandiri dalam mengatasi tantangan utama pembangunannya.

Bantuan USAID diharapkan akan meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian, hubungan dengan komunitas ilmiah yang lebih luas, serta peluang dan standar pendidikan terutama bagi mahasiswa dan akademisi perempuan serta meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen lembaga penelitian untuk

mengembangkan program dan pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap berbagai permasalahan pembangunan. Bantuan ini juga akan mendukung peningkatan pemanfaatan data untuk penyusunan kebijakan, dan memungkinkan adopsi teknologi di berbagai sektor kunci pembangunan seperti kesehatan, energi, dan iklim.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.1: Kapasitas Akademis dan Penelitian Ilmiah Meningkat

Ilmu pengetahuan membutuhkan ekosistem yang sehat untuk berkembang. Para ilmuwan harus memiliki akses terhadap sumber dana yang fleksibel dan tepat, jaringan pengetahuan internasional, dan pelatihan serta harus mampu terus meningkatkan kinerjanya melalui perolehan keterampilan baru, dan membimbing ilmuwan muda untuk bergabung dalam jajaran penelitian. IR ini melihat adanya tiga bidang penting untuk sistem penelitian di Indonesia: meningkatkan penelitian berbasis prestasi, memperkuat pertukaran pengetahuan domestik dan global, dan meningkatkan kualitas dan peluang di institusi penelitian yang menjadi sasaran. IR ini berfokus pada unsur-unsur pendidikan tinggi yang sangat penting untuk penguatan keseluruhan infrastruktur akademik di Indonesia.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.1.1 – Penelitian berdasarkan bobot ilmiah meningkat

Meningkatkan standar pendanaan penelitian kompetitif merupakan komponen inti dari infrastruktur IPTEK di negara manapun, akan tetapi hal ini menjadi elemen kunci yang tidak ada di Indonesia. Kualitas dan integritas harus berakar pada kajian yang berdasarkan pada prestasi dan proses yang transparan. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) baru-baru ini menerbitkan laporan dengan sponsor dari Bank Dunia dan AusAID tentang kebutuhan penting akan adanya suatu badan independen yang mengelola pemberian hibah ilmiah (Brodjonegoro, 2012). Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (ISF) akan mengisi kesenjangan penting di Indonesia dengan menjadi tolok ukur nasional keunggulan ilmu pengetahuan melalui pemberian penghargaan penelitian kompetitif untuk para ilmuwan dan institusi di Indonesia. Penghargaan ini akan berbasis pada prestasi, memungkinkan fleksibilitas kegiatan penelitian, dan dapat menerima dana dari swasta, pemerintah, maupun donor internasional. Laporan lainnya telah menegaskan kebutuhan ini, laporan Bank Dunia terbaru menggambarkan masalah sistemik dalam pengeluaran dana penelitian publik yang terkotak-kotak dan tidak terkoordinasi di Indonesia (2013c). Jalan menuju pembentukan badan sejenis ISF yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia adalah sebuah proses panjang yang memerlukan rekonsiliasi kebijakan yang saat ini tidak terkoordinasi, alokasi dana khusus, dan kemandirian.

Suatu kegiatan yang menggambarkan sub-IR ini adalah dibentuknya Dana Bilateral Penelitian Indonesia-Amerika. Investasi intelektual USAID di Indonesia akan semakin bermanfaat dengan adanya dukungan untuk mencapai visi ISF. Sebagai tanda akan adanya bantuan untuk membangun fondasi ISF, USAID akan mengupayakan pembentukan dana bilateral penelitian ilmiah yang akan bersama-sama mendanai program prioritas yang menyokong kepentingan kedua belah pihak. Dana tersebut akan menjadi transisi dari program USAID yang sudah ada seperti Kemitraan untuk Peningkatan Keterlibatan dalam Riset (*Partnerships for Enhanced Engagement in Research/PEER*) di bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan dan akan terus bekerja sama dengan mitra seperti *National Science Foundation* dan *National Institutes of Health*. Dana ini sekaligus akan menjadi mekanisme tidak hanya untuk mendanai kerjasama ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengalihkan keahlian teknis dan praktik terbaik dari pemberian hibah dan administrasi pendanaan ilmiah untuk Indonesia.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.1.2 – Pertukaran pengetahuan di dalam dan luar negeri meningkat

Selain dukungan untuk penelitian berkualitas tinggi, ilmuwan Indonesia dan rekan dari lembaga akademis di seluruh Indonesia harus memiliki akses yang lebih besar terhadap ilmu pengetahuan global.

Hal ini akan mengatasi “ekosistem” ilmiah yang saat ini tidak terkoordinasi dan mencegah duplikasi upaya hingga di tingkat nasional, aspek kunci yang dapat meningkatkan pertukaran dengan para ilmuwan asing. Melalui keterhubungan yang lebih tinggi, Indonesia akan mampu meningkatkan kredibilitasnya dalam komunitas ilmiah global, yang akan membantu Amerika dan ilmuwan asing lainnya agar ingin terlibat dalam pertukaran dengan komunitas ilmiah Indonesia.

Kegiatan lain yang juga potensial adalah portal perpustakaan digital dimana universitas dan kementerian terkait dapat menyederhanakan mekanisme publikasi jurnal dan penyebaran informasi dengan mengambil materi daring (*online*). Ilmuwan Indonesia juga membutuhkan peningkatan akses terbuka ke portal web dan berlangganan *database* ilmiah internasional yang akan memberikan akses terhadap publikasi internasional dan kemajuan ilmu terkini. Hasil program ini juga akan meningkatkan jumlah kerjasama internasional yang dapat dimulai langsung oleh para ilmuwan. Melalui portofolio pendidikan, lingkungan, dan kesehatan, dukungan akan terus diberikan kepada para pemangku kepentingan utama di bidang ini untuk melanjutkan pengembangan keterampilan teknis dan kontribusinya ke berbagai bidang prioritas seperti perubahan iklim dan penyakit menular.

Salah satu contoh kegiatan lain yang sedang dilakukan adalah *Global Research and Innovation Fellowship Network* (GRIFN) USAID, kemitraan yang akan menempatkan mahasiswa S1 dan S2 bidang IPTEK dari Amerika di universitas yang ada di Indonesia.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.1.3 – Kualitas dan kesempatan pendidikan tinggi meningkat
Sub-IR ini berfokus untuk mengatasi hambatan institusional yang menghalangi penelitian produktif, meningkatkan manajemen kelembagaan untuk memperkuat kualitas akademik, dan meningkatkan kualitas lulusan dan penelitian ilmiah. Menciptakan budaya penelitian di institusi pendidikan tinggi adalah kebutuhan penting. Sebagai contoh, salah satu hambatan untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi institusi pendidikan tinggi adalah peraturan yang ketat yang saat ini diterapkan oleh DIKTI yaitu mewajibkan dosen untuk berfokus pada tugas mengajar dengan hanya menyisihkan sebagian kecil waktu untuk penelitian. USAID dapat bekerjasama dengan DIKTI untuk menyusun peraturan yang akan mendorong institusi pendidikan tinggi menumbuhkan budaya penelitian dan memberikan insentif kepada mahasiswa dan dosen untuk melakukan penelitian dan meningkatkan keterkaitan antara penerapan pengetahuan teori dan keterampilan penelitian praktis. Dengan berfokus pada kualitas pendidikan tinggi di lembaga riset tertentu dan meningkatkan kesempatan yang tersedia untuk para ilmuwan Indonesia, USAID akan membuat perbedaan yang signifikan untuk membantu meningkatkan ilmu pengetahuan dan penelitian Indonesia agar memenuhi standar internasional. Program yang ada akan disesuaikan di masa yang akan datang untuk membenahi pembelajaran, memperbaiki kurikulum pengajaran, meningkatkan keterampilan administrasi serta kapasitas di lembaga penelitian.

Di Indonesia, seperti di negara lain di seluruh dunia, ketidakseimbangan gender juga terjadi dalam pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika, di mana siswa laki-laki melebihi siswa perempuan karena berbagai hambatan bagi perempuan. Untuk itu Pemerintah AS akan mendorong kesetaraan gender dan mendukung kepemimpinan perempuan dan anak perempuan, beasiswa dan kesempatan pertukaran akan mendorong mahasiswi dan ilmuwan perempuan untuk berkarya di bidang ini.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.2: Proses Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data Meningkat

IR ini berfokus pada tiga bidang: meningkatkan mekanisme pengaruh analisis data terhadap kebijakan dan program, meningkatkan kemampuan analisis, dan memperkuat advokasi dan permintaan untuk

pemanfaatan data. Siklus ini terpelihara dengan adanya permintaan dari para ahli dan non-ahli untuk memanfaatkan data terbaik untuk sejauh mungkin mengambil keputusan berdasarkan informasi. Setiap sub-IR berfokus pada satu elemen dalam siklus dan peran yang diperlukan dan bila digabungkan akan berdampak besar pada penyusunan kebijakan Indonesia mengenai berbagai permasalahan kunci di bidang pembangunan.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.2.1 –Mekanisme untuk mempengaruhi analisis data tentang kebijakan dan program meningkat

Penggunaan data dalam pemerintahan dan struktur pengambilan keputusan lainnya merupakan hal utama untuk terwujudnya Sub-IR ini. Dukungan akan diberikan untuk mempertemukan pemerintah, universitas, dan mitra industri di forum yang menangani masalah umum yang memerlukan pertukaran pengetahuan yang lebih banyak untuk membahas, mengembangkan, dan menyempurnakan kebijakan. Saat ini, berbagai program teknis USAID mendukung berbagai pengumpulan data dan analisis yang ditujukan sebagai masukan untuk kebijakan dan program. Upaya ini akan ditingkatkan dengan adanya dukungan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas data, sistem yang efektif mengelola dan memanfaatkan data, dan bantuan untuk meningkatkan kemampuan analisis dari lembaga.

Salah satu contoh kegiatan adalah melakukan diskusi antara pihak pemerintah-universitas-industri yang meningkatkan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. USAID dapat menggunakan pengaruhnya untuk membentuk forum di mana para pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, dan perusahaan swasta membahas berbagai permasalahan penting. Selain forum baru ini, USAID perlu mengkaji apakah ada mekanisme lain dalam sistem pemerintahan yang dapat dibangun dan diperkuat oleh USAID dan akan terus ada. Asumsinya adalah bahwa RISTEK atau Dewan Riset Nasional (DRN) memiliki fungsi yang melekat untuk memfasilitasi dan mendukung koordinasi analisis data untuk penyusunan kebijakan. Hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan upaya penelitian kerjasama dan investasi oleh kementerian yang berbeda di Indonesia yang cenderung bekerja secara terpisah. Anggota forum akan diundang untuk berpartisipasi secara berkala membahas permasalahan yang ada saat ini seperti kelangkaan air, pertanian, organisme yang dimodifikasi secara genetik, atau pelayanan kesehatan di daerah pedesaan. Saat ini Indonesia tidak memiliki forum seperti yang digambarkan di atas sementara pertukaran informasi diperlukan untuk mengadaptasi model ini. Kegiatan lainnya adalah dukungan untuk analisis data dan menyertakan penasihat surveilans penyakit dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan bimbingan kepada staf dan membantu pengumpulan data dan proses analisis, sistem, dan keterampilan yang lebih baik.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.2.2 – Kapasitas untuk melakukan analisis meningkat

USAID akan terus bekerjasama dengan kelompok akademis dan peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas di Indonesia. Tapi tanpa keterkaitan dengan kebijakan, upaya yang dilakukan tidak akan berdampak pada pembangunan. USAID akan membantu memberdayakan entitas lokal yang juga merupakan pelopor kebijakan ilmu pengetahuan dan dapat memainkan peran terdepan dalam menghasilkan pendapat ahli berdasarkan data dan penelitian terbaik di Indonesia dan di sisi lain untuk menjawab pertanyaan penting tentang pembangunan.

Kegiatan potensial adalah memperkuat Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang menjembatani para ahli ilmu pengetahuan dan pembuat kebijakan serta memainkan fungsi penting dalam "ilmu pengetahuan-untuk-kebijakan." AIPI berada dalam posisi yang baik untuk mengumpulkan panel ahli yang akan menganalisis temuan penelitian dan mengkomunikasikan pendapat dan rekomendasi berdasarkan informasi untuk lembaga pengambil keputusan. USAID dapat membantu membangun kapasitas AIPI untuk menghasilkan laporan bersama dan berkualitas tentang topik pembangunan yang

relevan, serta membawa pendapat tersebut kepada para pembuat kebijakan yang relevan dan masyarakat. Selain itu, bantuan teknis kepada lembaga pemerintah akan memberikan bimbingan kepada staf Pemerintah Indonesia untuk menggunakan data dalam pengambilan keputusan kebijakan dan program yang lebih baik. Dilengkapi dengan investasi berkelanjutan dalam pendidikan, bantuan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap kapasitas analisis yang lebih mendalam.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.2.3 –Advokasi dan permintaan untuk pengumpulan dan analisis data meningkat

Kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat dalam mengadvokasikan pengambilan keputusan berdasarkan data di bidang kesehatan, kehutanan, kelautan, perubahan iklim, energi, pendidikan, dan bidang lainnya menjadi bagian penting dari strategi USAID. Ilmuwan muda yang masih berada di awal karirnya berada di posisi yang baik untuk melakukan hal ini karena peran kepemimpinannya dan kredibilitasnya akan semakin meningkat di masa depan akan menjadi pertimbangan untuk berbagai permasalahan penting.

Suatu contoh kegiatan adalah membentuk Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Indonesia harus melakukan investasi untuk membentuk pemimpin ilmiah masa depan. Pemerintah AS dan USAID sudah meningkatkan peran ilmuwan muda melalui *U.S.-Indonesia Frontiers of Science* - sebuah simposium untuk mendorong pertukaran dan kemitraan antara ilmuwan terkemuka yang masih berada di awal karirnya dan datang dari berbagai negara. Mempertemukan berbagai ilmuwan muda terkemuka dari seluruh disiplin ilmu akan menghasilkan kerjasama ilmiah baru, dan juga telah mengokohkan hubungan penting antara kelompok peserta dan penyelenggara usia muda dan terkemuka dari Indonesia. Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, akan memanfaatkan keberhasilan tersebut dan menjadi forum yang berharga untuk generasi ilmuwan muda Indonesia berikutnya akan menyuarakan berbagai permasalahan penting untuk masa depan Indonesia. Selain itu, dukungan yang berkelanjutan akan mendorong masyarakat sipil mengadvokasi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan dan program berbasis data.

Hasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.3: Pendekatan Pembangunan Inovatif Dilaksanakan

IR ini berfokus untuk mendorong teknologi yang sudah terbukti dan pendekatan baru dalam pembangunan dijadikan percontohan, diadopsi, dan ditingkatkan skala pelaksanaannya. Fokus dari upaya ini ada pada (Sub-IR 4.3.2) kemitraan dengan sektor swasta. IR ini akan berpijak pada keberhasilan USAID yang telah dicapai di bawah kemitraan dengan Indonesia untuk percontohan teknologi baru di bidang kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian. Di bawah IR ini, kegiatan lain dapat mencakup analisis yang mengidentifikasi hambatan utama penelitian dan inovasi di Indonesia (misalnya peraturan perbekalan yang kaku, dukungan kelembagaan yang tidak memadai, atau kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual) atau peluang baru yang menjanjikan dalam “ekosistem” inovasi di Indonesia (misalnya universitas yang mendukung tumbuhnya inovasi, kawasan percontohan teknologi, atau program insentif untuk industri). Dengan asumsi bahwa inovasi dipahami sebagai suatu proses yang diakhiri dengan dihasilkan produk, pelayanan, metode, teknologi pemrosesan baru, atau kreasi lainnya yang telah digunakan dan menciptakan nilai di masyarakat, semakin banyak literatur yang menggiring perhatian pada perbedaan jender dalam pembangunan, akses dan penggunaan inovasi. USAID akan memastikan bahwa peningkatan inovasi pembangunan tidak hanya berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga dapat menurunkan ketidaksetaraan jender sebagai komponen esensial untuk mengadopsi /mengadaptasi inovasi.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.3.1 –Teknologi yang telah terbukti dimanfaatkan dan dilaksanakan sebagai percontohan

Pengenalan teknologi baru terbukti dapat memiliki dampak besar terhadap hasil-hasil pembangunan. Evaluasi teknologi dan pelaksanaan program percontohan yang efektif akan dilakukan melalui model baru kemitraan dengan USAID. Misalnya, inovasi baru dan teknologi dapat berkontribusi terhadap tujuan DO 2 dan DO 3 dalam menyediakan pelayanan esensial dan mengatasi penyakit menular. Alat diagnosis penyakit yang baru, seringkali lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan teknologi tradisional dan memberikan hasil diagnosis langsung saat uji kesehatan dilakukan - pertimbangan ini penting bagi daerah-daerah terpencil. Kemampuan untuk teknologi pengujian laboratorium di dalam negeri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang unik terkait dengan Indonesia akan meningkatkan penggunaan alat-alat baru. IR ini berupaya memperkuat kemampuan merancang dan melakukan studi percontohan, menganalisis hasil, dan menggabungkan pendekatan efektif ke sektor teknis yang relevan untuk peningkatan skala pelaksanaannya. Salah satu contoh teknologi yang sudah didukung USAID di Indonesia adalah GenXpert, teknologi yang memberikan hasil langsung saat uji kesehatan dilakukan untuk mendiagnosis TB yang resisten terhadap obat dan dapat secara signifikan mengurangi waktu diagnosis dari delapan minggu menjadi dua jam saja dalam banyak kasus sehingga bisa dilakukan pengobatan segera dan lebih sedikit yang meninggal (USAID/Indonesia, 18 April 2013). Inovasi juga dapat membantu transparansi data dan hasil. Program penyakit menular USAID memanfaatkan teknologi layanan pesan singkat (SMS) untuk mengumpulkan dan menyebarkan data yang terkait dengan informasi kesehatan penting. Database elektronik dan pelaporan otomatis memiliki potensi besar untuk meningkatkan penggunaan data di tingkat lokal, regional, dan internasional.

Contoh kegiatan di bawah sub-IR ini adalah Jaringan Solusi Pendidikan Tinggi yang telah diluncurkan oleh USAID/Washington sebagai upaya lima tahun dengan nilai 130 juta dollar AS yang berupaya menciptakan laboratorium pembangunan di universitas dengan komitmen menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk negara berkembang. Secara khusus, *Comprehensive Initiative On Technology Evaluation* dari *Massachusetts Institute of Technology* dan *International Development Innovators Network* dapat dihubungkan lebih erat dengan prioritas USAID di Indonesia. Komponen penting untuk peningkatan pemanfaatan teknologi adalah pengujian teknologi terbaru di Indonesia. USAID akan terus mendukung berbagai program percontohan yang memiliki potensi untuk ditingkatkan skalanya dan memiliki dampak pembangunan yang tinggi, dengan tujuan akhir untuk menciptakan landasan dan pendekatan sistematis yang dapat dipimpin oleh Indonesia. Kesempatan lain yang juga penting adalah bahwa para peneliti dan mitranya dapat didorong untuk mendapatkan hak paten untuk produk penelitiannya. USAID memiliki ceruk potensial untuk mengembangkan keterampilan dalam mempersiapkan pengajuan hak paten.

Subhasil Antara Kerjasama Pembangunan 4.3.2 – Inisiatif sektor swasta meningkat

Fokus lain dari IR ini adalah untuk membentuk kemitraan dengan sektor swasta dengan cara yang baru. Keterlibatan sektor swasta merupakan kunci untuk mengadopsi dan meningkatkan skala penggunaan teknologi dan inovasi baru dan cara-cara baru untuk mempengaruhi hasil pembangunan. Kemitraan ini bisa mencakup program baru di pendidikan tinggi yang akan meningkatkan keterkaitan antara kebutuhan industri dengan kurikulum universitas sehingga dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap kerja. Model kerjasama lainnya dengan sektor swasta termasuk mekanisme insentif seperti tantangan dan hadiah yang dapat digunakan untuk mengumpulkan banyak data (misalnya permintaan informasi kepada umum melalui media sosial) atau membawa para pendatang baru untuk berkontribusi dalam pemanfaatan teknologi untuk pembangunan.

Kegiatan potensial bisa mencakup program 'Inovasi untuk Indonesia' melalui Kantor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi USAID yang sedang mempertimbangkan untuk menyediakan dana stimulan bagi

pengusaha Indonesia yang berminat mengumpulkan data yang akan digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan pendekatan inovatif untuk pembangunan internasional.

ASUMSI UTAMA DAN RISIKO

Asumsi utama dan risiko yang terinci di bawah ini dapat diterapkan secara luas pada upaya USAID/Indonesia selama periode CDCS ini. Asumsi atau risiko yang berhubungan dengan bidang tertentu dari portofolio USAID/Indonesia diindikasikan sebagai berikut:

Asumsi dan Risiko

1. *Upaya penyelarasan dengan prioritas Pemerintah Indonesia akan terus dilakukan bahkan setelah pemilu 2014:* Strategi ini mengasumsikan bahwa, terlepas dari hasil pemilu 2014, Pemerintah Indonesia akan tetap berkomitmen untuk bermitra dalam mencapai tujuan bersama, dan dukungan masyarakat akan terus berlanjut.
2. *Kinerja makroekonomi Indonesia akan tetap stabil:* Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini stabil. Program USAID/Indonesia saat ini dan yang masih dalam rencana telah dirancang berdasarkan konteks prioritas anggaran pemerintah Indonesia, tetapi bila kondisi makro ekonomi saat ini mengalami perubahan signifikan, maka dapat membatasi potensi program untuk mencapai hasil.
3. *Desentralisasi akan terus berlanjut secara positif:* Indonesia akan terus menjalankan desentralisasi, dan proses tersebut terus berkembang secara positif. Dengan adanya peluang yang diciptakan oleh desentralisasi, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta akan melakukan upaya dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.
4. *Keterlibatan sektor swasta:* Strategi ini mengasumsikan bahwa aliansi sektor swasta dan kemitraan pemerintah-swasta, jika dirancang dengan baik, dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan pendidikan, kesehatan, lingkungan dan peningkatan skala teknologi inovatif; dan aktifnya keterlibatan sektor swasta bisa melampaui model tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berjalan selama ini.
5. *Bencana alam akan terjadi dan frekuensi serta intensitas kejadian cuaca yang berhubungan dengan perubahan iklim akan terus meningkat:* Kerentanan Indonesia terhadap bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim, dapat mempengaruhi pencapaian tujuan CDCS dalam batasan waktu dan ruang lingkup strategi ini.
6. *Pembangunan Indonesia Timur yang Berkelanjutan (spesifik untuk IR 1.4):* Keberhasilan diasumsikan sebagai keadaan yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang relatif bebas di Indonesia Timur dibarengi dengan rasa memiliki dari Pemerintah Indonesia dan kemampuan lembaga pemerintah AS untuk memberikan komitmen dan dukungan lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan. USAID akan terus mendapat manfaat dari kerjasama yang kuat dengan beberapa donor utama lainnya (PBB, AusAID, dan New Zealand Aid). Terakhir, keputusan USAID untuk terlibat dalam pembangunan di Indonesia Timur harus diakui dari awal sebagai upaya jangka panjang. Meskipun USAID yakin bahwa kemajuan yang signifikan dapat dicapai di daerah/masyarakat sasaran selama periode CDCS ini, pencapaian tersebut akan memerlukan perhatian lanjutan setelah periode lima tahun CDCS ini berakhir.
7. *Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (spesifik untuk IR 3.4):* Keberhasilan Indonesia dan komitmennya kepada negara tetangganya akan mempertahankan minat terhadap SSTC. Secara keseluruhan hubungan AS-Indonesia akan tetap positif dan akan ada rencana selanjutnya untuk bekerja sama menangani berbagai permasalahan pembangunan di daerah lain. Program bilateral USAID dan mitra pemerintah di negara-negara lain di kawasan yang sama akan

menyambut kerjasama dan mungkin bersama-sama mendanai program dengan Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian bersama. Asumsi dan risiko yang diuraikan di atas secara bersamaan menjadi latar belakang penyusunan program Pemerintah AS, dan asumsi dan risiko akan dikaji sebagai bagian monitoring dan evaluasi yang biasa dilakukan untuk menentukan sejauh mana tujuan Pemerintah AS terhambat atau dipromosikan oleh perubahan dari asumsi risiko yang digunakan disini. Jika terjadi perubahan substansial terhadap asumsi dan risiko yang digunakan, maka setiap perubahan terhadap tujuan utama, tujuan atau pendekatan program dalam CDCS ini akan menjadi masukan untuk konteks kerangka M & E yang diuraikan dalam dokumen ini.

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBELAJARAN

Gambaran Umum dan Dasar Pemikiran

Monitoring dan Evaluasi (M&E) secara garis besar menjelaskan tentang proses, sumber daya, dan indikator yang diperlukan untuk menunjukkan akuntabilitas. Melalui proses ini USAID/Indonesia akan mengukur kemajuan menuju pencapaian DO, menjelaskan alasan penggunaan sumber daya bantuan dengan bukti empiris dan data, dan mendefinisikan kerangka untuk menentukan perbaikan yang diperlukan selama pelaksanaan program. Sebagai instrumen yang efektif untuk pembelajaran, M&E harus memiliki fleksibilitas. M&E lebih dari sekadar mekanisme pelacakan, tetapi juga merupakan bagian dari proses penyusunan, desain dan pelaksanaan program. Hal ini memastikan bahwa M&E menjadi proses yang dinamis dan hasil analisisnya digunakan untuk mengarahkan tindakan selanjutnya. Dengan cara ini, kualitas pengelolaan program dan akuntabilitas untuk hasil dapat ditingkatkan.

Upaya M&E akan secara terus-menerus melakukan verifikasi kemajuan dan pembaharuan indikator yang telah ditetapkan serta hubungan kausal ke tingkat yang lebih tinggi dalam Kerangka Hasil. Hal ini melibatkan pengumpulan data indikator yang sudah terpilah secara seksama, konsisten, dan tepat waktu, serta konsultasi rutin dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja. Kerangka waktu pengumpulan data, evaluasi proses, dan saluran komunikasi yang solid sangat penting untuk memastikan kemampuan melakukan penyesuaian dan koreksi sebelum suatu program diselesaikan. M&E juga harus mencakup unsur kelayakan. Penelusuran indikator, konsultasi, dan pengumpulan data yang relevan harus menjadi bagian yang terintegrasi dari pelaksanaan sehingga ada sistem untuk mengumpulkan dan mengkaji informasi secara teratur.

Kerjasama, Pembelajaran, dan Adaptasi

Rencana keseluruhan Monitoring dan Evaluasi USAID melibatkan mekanisme CLA (*Collaboration, Learning, dan Adapting*) yang terdiri dari tiga unsur kunci:

- *Kerjasama*: Membangun sistem dan jaringan pelaporan dan komunikasi antara staf USAID dan pemangku kepentingan yang sesuai.
- *Pembelajaran*: Memantau indikator, menghasilkan sistem untuk menganalisis data, dan mengkaji kemajuan melalui kaca mata hipotesis pembangunan.
- *Adaptasi*: Memanfaatkan data untuk meningkatkan pengelolaan program dan kinerja yang akan memperkuat hasil.

Instrumen M&E

USAID/Indonesia akan menerapkan kebijakan dan instrumen sesuai standar USAID di Indonesia maupun USAID di seluruh dunia sebagai pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran. Pedoman dan kebijakan yang digunakan oleh USAID di seluruh dunia dan kebijakan evaluasi akan menjadi parameter umum untuk penerapan dan pelaksanaan M&E, dan pada saat yang sama USAID/Indonesia akan mengembangkan Rencana Manajemen Kinerja CDCS, dan mendefinisikan serta mengadopsi *Mission Order* untuk Evaluasi, Pemantauan Kinerja, dan Kajian Portofolio. Instrumen pengumpulan data dan manajemen akan mencakup GIS yang akan didukung oleh rekan-rekan di Kantor Pembangunan Regional untuk Asia di Bangkok dan USAID/Washington GeoCenter. Hal ini juga akan mencakup kontrak untuk melakukan M&E dengan pihak luar yang akan menjamin transparansi yang lebih besar dan memberikan penilaian obyektif tentang kinerja program. Kajian kualitas data secara berkala akan memastikan akurasi data indikator yang digunakan untuk mengambil keputusan manajemen dan pelaporan hasil.

KERANGKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI USAID

CDCS ini konsisten dengan Kerangka Kebijakan USAID 2011-2015 dan akan mendukung dua Tujuan Kerjasama Pembangunan Utama: (1) ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, tercantum di bawah DO 4, dan (2) efektivitas bantuan dan koordinasi donor. CDCS ini sejalan dengan draft maupun dokumen final kebijakan dan strategi USAID termasuk, tapi tidak terbatas pada draft Kebijakan Keanekaragaman Hayati, Strategi Perubahan Iklim Global dan Pedoman Tambahan GCC, dan Strategi Air dan Pembangunan, dan dikembangkan di bawah koordinasi dan bantuan teknis dari kantor USAID/Washington yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya.

USAID Forward

USAID/Indonesia telah melakukan upaya terpadu untuk melaksanakan reformasi USAID *Forward* dan akan terus menerapkan prinsip-prinsip USAID *Forward* di seluruh siklus program dan pelaksanaan CDCS. Setiap Tim DO akan mengintegrasikan USAID *Forward* ke dalam Dokumen Kajian Proyek (*Project Activity Design/PAD*) dan koordinator tim bertanggung jawab untuk melanjutkan agenda reformasi dan memberikan laporan kemajuan secara berkala. USAID/Washington telah mengumpulkan data tentang indikator kunci USAID *Forward* dan USAID/Indonesia akan terus menelusuri dan melaporkan data ini.

Memperkuat Kapasitas untuk Mencapai Hasil: USAID/Indonesia akan mengembangkan rencana evaluasi rinci yang menjabarkan garis besar pertanyaan untuk menguji asumsi kunci dan menunjukkan kemajuan ke arah tujuan yang dicantumkan dalam kerangka hasil. Rencana evaluasi akan diuraikan dalam CDCS Rencana Pengelolaan Kinerja dan kemudian dirinci dalam setiap PAD. Rencana evaluasi akan memastikan pembelajaran dari kemajuan yang telah dicapai dan memaksimalkan dampak sumber daya bantuan asing. USAID/Indonesia juga akan terus berupaya untuk membangun kapasitas internal dengan memperkuat manajemen modal sumber daya yang ada. Selama periode CDCS ini, USAID/Indonesia akan melakukan program bimbingan untuk staf, baik staf Departemen Luar Negeri AS (*Foreign Service Officer/FSO*) dan staf lokal Indonesia (*Foreign Service National/FSN*). *Mission Order* tentang Program Mentoring USAID/Indonesia menguraikan praktik standar secara garis besar. FSN akan mengambil peran kepemimpinan dalam melaksanakan dan mengelola program-program pembangunan di bawah kerangka CDCS, dan akan didorong untuk terlibat dalam peluang FSN *Fellowship* di Washington dan dengan kantor USAID di negara lain.

Menjalin Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan: Selama penyusunan CDCS, USAID/Indonesia telah terlibat dalam serangkaian konsultasi menyeluruh dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan mitra pelaksana. USAID akan meneruskan kemitraan yang sudah terjalin selama periode CDCS sebelumnya. USAID saat ini sedang merekrut *liaison officer* khusus untuk dua lembaga utama Pemerintah Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan Badan Nasional Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), untuk memperkuat kemitraan kunci ini. Tim DO akan melanjutkan kerjasama yang erat dengan Kementerian Pemerintah Indonesia. Saat menyusun PAD ini, tim DO akan mencari peluang untuk berinvestasi langsung dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Indonesia yang akan mendukung pelaksanaan DO ini dan organisasi lokal yang memiliki kapasitas yang sesuai. Kesempatan untuk Kemitraan Pemerintah-Swasta juga akan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Solusi yang Mengubah Cara Kerja Tradisional: Indonesia belum menghasilkan ilmu pengetahuan atau inovasi sesuai kemampuannya. Hal ini mempengaruhi kemajuan dalam mencapai tujuan utama pembangunannya. Salah satu prioritas tinggi Pemerintah Indonesia, yang tercermin dalam tujuan pembangunan jangka menengah nasionalnya adalah untuk memajukan IPTEK. DO 4 bersifat lintas

sektor dan berlandaskan pada kegiatan efektif dalam setiap sektor pembangunan dengan cara yang strategis. USAID/Indonesia akan memperdalam kemitraan yang telah terjalin dengan kementerian teknis kunci (Riset dan Teknologi (RISTEK), Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan (termasuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), perguruan tinggi, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan menggalang lebih banyak kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah untuk lebih memajukan kapasitas Indonesia di bidang IPTEK yang telah ditetapkan. USAID menempati posisi unik untuk memanfaatkan kekuatan IPTEK dalam meningkatkan pembangunan.

LAMPIRAN 1: REFERENSI

- Akil, Ha et al (2011). *Study on the Status of Science and Technology Development in Indonesia*, LIPI Press.
- Antara News (2010, Jan 25). "U.S. envoy praises Indonesia for sending aid to Haiti." <http://www.antaraneews.com/en/news/1264400894/us-envoy-praises-indonesia-for-sending-aid-to-haiti> (Accessed 07/12/2013)
- Antara News (2012, Dec 29). "Indonesia delivers aid to victims of typhoon bopha" <http://www.antaraneews.com/en/news/86472/indonesia-delivers-aid-to-victims-of-typhoon-bopha> (Accessed 07/12/2013)
- Aritonang, Margareth (2012). "Religious intolerance is alive and kicking". *The Jakarta Post*. Dec. 18, 2012. <http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/18/religious-intolerance-alive-and-kicking.html> (Accessed 07/12/2013)
- Asian Development Bank (2011). *Climate Risk and Adaptation Country Profile: Indonesia*.
- Aspinall, Edward and Marcus Mietzner, eds. (2010) *Problems of Democratisation in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- AusAID (2012a). NGO Sector Review: Phase 1 Findings. STATT. <http://www.ausaid.gov.au/business/Documents/indo-ks15-ngo-sector-review-phase1.pdf> (Accessed 07/12/2013)
- AusAID (2012b) *Australia-Indonesia partnership for pro-poor policy: The knowledge sector initiative*, Government of Australia.
- AusAID (2012c). *Jender Strategy and Action Plan: Indonesia. Poverty Reduction Support Facility. Version 2*
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2012, 2007). *Indonesia Demographic Health Survey*.
- BAPPENAS (2007). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. [National Development Plan 2005-2025]* National Development Planning Agency (BAPPENAS). <http://www.bappenas.go.id/node/27/1584/naskah-ruu-rpjpgn-tahun-2005-2025/> (Accessed 07/12/2013)
- Bellman, E. (2013, June 25). "Indonesian Youth Are Concerned About Foreign Influence". *Wall Street Journal*. <http://blogs.wsj.com/searealtime/2013/06/25/indonesian-youth-are-concerned-about-foreign-influence/?KEYWORDS=Indonesia> (Accessed 07/12/2013)
- Brodjonegoro S.S. and Greene M.P. (2012). "Creating an Indonesian Science Fund." Indonesian Academy of Sciences.
- Faizal EB (2012, Dec 15). "Few Indonesian science papers published in int'l journals," *The Jakarta Post*.
- Government of Indonesia (2010) *Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 5 of 2010 regarding the National Medium-term development plan (RPJMN) 2010-2014*. National Development Planning Agency.
- Harvard Kennedy School of Public Policy, Ash Center (2010). *From Reformasi to Institutional Transformation: A Strategic Assessment of Indonesia's Prospects for Growth, Equity, and Democratic Governance*.
- INSEAD and WIPO (2012). *The Global Innovation Index 2012*, INSEAD.
- Institute of International Education (2012). *Open doors fact sheets*.
- IUCN (2012). The IUCN Redlist of Threatened Species. www.iucnredlist.org (Accessed 07/12/2013)
- Ja, D. et al (2012). "Homophobia on the rise, survey says". *The Jakarta Post*. Oct. 22, 2012. <http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/22/homophobia-rise-survey-says.html> (Accessed 07/12/2013)
- Komite Inovasi Nasional (2012). *Prospek Inovasi Indonesia*, Komite Inovasi Nasional, 2012
- Komnas Perempuan. (2012). "Lembar Fakta: menyikapi dampak kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dan agama di Aceh, Jangan Ada Lagi! [Fact Sheet: A stance on the impacts of discriminatory bylaws made in the name of morality and religion in Aceh]" <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2012/09/Lembar-Fakta-Kasus-Putri.pdf>. (Accessed 07/12/2013)
- Lakitan B., Hidayat D. and Herlinda S. (2012). "Scientific productivity and the collaboration intensity of Indonesian universities and public R&D institutions: Are there dependencies on collaborative R&D with foreign institutions?" *Technology in Society* 34.
- Liddle, R. William and Saiful Mujani. (Forthcoming). "Indonesian Democracy: From Transition to Consolidation." Forthcoming in Mirjam Kunkler and Alfred Stepan, eds., *Indonesia, Islam and Democratic Consolidation*. New York: Columbia University Press.

New Zealand Embassy (2011). "New Zealand Ambassador Welcomes Indonesia's Grant to the Christchurch Earthquake Appeal." <http://www.nzembassy.com/indonesia/news/new-zealand-ambassador-welcomes-indonesia%E2%80%99s-grant-to-the-christchurch-earthquake-ap-0> (Accessed 07/12/2013)

News.com.au (2011, Jan 20). "Australia takes flood aid from Indonesia." <http://www.news.com.au/breaking-news/floodrelief/australia-takes-flood-aid-from-indonesia/story-fn7ik2te-1225991924034> (Accessed 07/12/2013)

Nguyen TV and Pham LT (2011). "Scientific output and its relationship to knowledge economy: An analysis of ASEAN countries," *Scientometrics*, 89.

Nugroho, S. et al (2011, Nov 2). "Indonesia donates US\$ 1m in aid to Turkey." *The Jakarta Post*. <http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/02/indonesia-donates-us-1m-aid-turkey.html> (Accessed 07/12/2013)

Oberman, R. et al (2012). *The Archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential*. McKinsey Global Institute.

OECD (2012). The OECD Social Institutions and Gender Index. <http://www.oecd.org/dev/poverty/theoecdsocialinstitutionsandgenderindex.htm> (Accessed 07/12/2013)

OECD (2010). "Science and Innovation: Country Notes: Indonesia" in *Science, Technology and Industry Outlook*.

Pew Research Center (2013). Global Attitudes Project, <http://www.pewglobal.org/database/> (Accessed 07/12/2013)

Putnam, AG (1988). "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," International Organization.

Richard Horton, Selina Lo (2013, June 27). "[Turkey's democratic transition to universal health coverage](#)" The Lancet online.

Rogers, Simon (2010, Sept 30). "Pakistan flood aid pledged, country by country." *The Guardian*. <http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/aug/09/pakistan-flood-aid> (Accessed 07/12/2013)

Saich, Anthony et al. (2010) "From Reformasi to Institutional Transformation: A Strategic Assessment of Indonesia's Prospects for Growth, Equity, and Democratic Governance." Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Kennedy School of Government, University of Harvard, Cambridge, MA.

Schwab K (2012) *The Global Competitiveness Report 2012-2013*, World Economic Forum.

Shah, R. (2011). *Breakthroughs for Development*, Science 22 July 2011: 333 (6041), 385.

Shah, R. (2012). "Introduction: Bending the curve of development," *USAID Frontiers in Development*, USAID.

Tong D. and Waltermann B. (2013). *Growing pains, lasting advantage: Tackling Indonesia's talent challenges*, The Boston Consulting Group.

UNESCO (2011), *Science Report 2010: The Current Status of Science around the World*, UNESCO.

United Nations. 2011. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Combined sixth and seventh periodic reports of States parties. Indonesia. CEDAW/C/IDN/6-7. http://www.bayefsky.com/reports/indonesia_cedaw_c_idn_6_7.pdf

USAID (2011). Getting REDD+ Ready for Women: An analysis of the barriers and opportunities for women's participation in the REDD+ sector in Asia. Washington: DC.

USAID/Indonesia (2012a). Papua Strategic Report.

USAID/Indonesia (2012b). Evaluation of USAID/Indonesia Forestry Resource Sustainability Program (FOREST)

USAID/Indonesia (2013a). USAID Democracy, Governance, and Human Rights Assessment of Indonesia.

USAID/Indonesia (2013b). Indonesia Biodiversity and Tropical Forestry Assessment (FAA 118/119).

USAID/Indonesia (2013c). Energy and Forest Sector Assessments.

USAID/Indonesia (2013d). Indonesia as an Emerging Assistance Provider Assessment.

USAID/Indonesia (2013e). Evaluation of USAID-MMAF Marine Resources Program (MRP)

USAID/Indonesia (2013, April 18). "United States honors Indonesia as a champion in the global fight against tuberculosis" Press Release. <http://www.usaid.gov/indonesia/press-releases/united-states-honors-indonesia-champion-global-fight-against> (Accessed 07/12/2013)

WISAT and OWSD (2013). *National Assessments on Gender Equality in the Knowledge Society: Gender in Science, Technology and Innovation* WISAT.

Wolde-Rufael, Y. (2004) "Disaggregated industrial energy consumption and GDP: the case of Shanghai, 1952–1999" *Energy Econ.* 26, 69-75.

World Bank (2006). Economic Impacts of Sanitation in Indonesia: A five-country study conducted in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, the Philippines, and Vietnam under the Economics of Sanitation Initiative.

https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/esi_indonesia.pdf (Accessed 07/12/2013)

World Bank (2012a). Indicators Dataset. <http://data.worldbank.org/indicator> (Accessed 07/12/2013)

World Bank (2012b). Knowledge Economy Index.

World Bank (2013a). Indonesia Profile. <http://data.worldbank.org/country/indonesia> (Accessed 07/12/2013)

World Bank (2013b). Research and innovation in science and technology project.

World Bank (2013c). Indonesia: Research & development financing.

World Health Organization (WHO) (2009). Water safety plan manual.

http://www.who.int/water_sanitation_health/publication_9789241562638/en/ (Accessed 07/12/2013)

World Health Organization (WHO) (2013). Indonesia Tuberculosis Country Profile.

<http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/index.html> (Accessed 07/12/2013)

LAMPIRAN 2: DAERAH SASARAN MENURUT LETAK GEOGRAFIS

Penentuan daerah sasaran menurut letak geografis terutama didasarkan pada pertimbangan profil Kesehatan dan Lingkungan:

- Indikasi alokasi terbesar –Kesehatan dan Lingkungan
- Kesehatan – kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan tertinggi
- Lingkungan – dampak terbesar yang bisa dilakukan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati
- Tata Kelola Pemerintahan – akan mengikuti kegiatan Kesehatan dan Lingkungan
- Sains dan Teknologi – berfokus pada universitas, lembaga penelitian
- Pendidikan – akan mengikuti kegiatan Kesehatan dan Lingkungan



Kesehatan

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun letak geografis negara kepulauan Indonesia yang luas dan lingkungan yang beragam dikombinasikan dengan jumlah penduduk besar dan berpindah tempat membentuk profil kesehatan yang unik. Hal ini ditandai dengan prevalensi penyakit, tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir, dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas yang berbeda menurut wilayahnya. Hasil analisis ketat terhadap

kriteria analitis kunci mengarah pada pemilihan 14 daerah fokus dengan prioritas kesehatan. Kriteria ini meliputi: daerah prioritas Pemerintah Indonesia, daerah dengan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir tertinggi, dan daerah dengan prevalensi HIV dan TB tinggi. Berbagai hal tersebut terjadi di wilayah yang paling padat penduduknya. Sasaran program air secara strategis ditetapkan di daerah yang memiliki konsentrasi penduduk miskin dan berpenduduk padat di perkotaan, yang sama dengan daerah yang menjadi prioritas bidang kesehatan. Provinsi di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku Utara dan Maluku) dipilih karena angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang lebih tinggi (meskipun secara jumlah sedikit), kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, dan mengalami generalisasi epidemi HIV. Penetapan sasaran sumber daya di berbagai bidang prioritas diharapkan dapat mencapai hasil terukur paling tinggi dan memaksimalkan dampak pembangunan di sektor kesehatan.

Ref: SDKI 2007, data AIDS National, Riskesdas 2010.



Lingkungan

Dalam upaya untuk mengidentifikasi wilayah geografis prioritas mana yang akan menghasilkan dampak terbesar untuk pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim, USAID/Indonesia melakukan kajian Keanekaragaman Hayati dan Hutan Tropis Indonesia (FAA 118/119) serta evaluasi dan kajian kemajuan sektor kelautan dan kehutanan. Kajian ini menganalisis kriteria biofisik seperti kekayaan spesies darat dan laut, endemisme, tutupan hutan, lokasi kawasan lindung, dan kawasan gambut dalam potensi penyerapan karbon tertinggi. Selain itu, yang menjadi pertimbangan

lain adalah faktor-faktor seperti lokasi prioritas Pemerintah Indonesia untuk pelestarian laut dan darat serta investasi USAID yang saat ini masih berjalan. Sebagai hasilnya 12 provinsi prioritas diidentifikasi sebagai daerah sasaran program keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Target investasi USAID di daerah-daerah prioritas diharapkan dapat mencapai hasil terukur yang paling besar dan memaksimalkan dampak pembangunan dalam mencapai tujuan pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa upaya-upaya ini akan dikembangkan dari keunggulan komparatif USAID, yang dikoordinasikan dan melengkapi kepentingan Pemerintah Indonesia dan donor lainnya.

Kesimpulan

USAID/Indonesia secara aktif terlibat dalam pembangunan transformatif dengan melakukan analisis program pembangunan secara seksama dan menerapkan pendekatan berdasarkan data yang disebut sebagai reformasi ambisius yang tertera dalam Kerangka Kebijakan USAID 2011-2015. Mengintegrasikan analisis geografis dalam proses penyusunan strategi telah menghasilkan pemilihan 14 provinsi di mana investasi pembangunan USAID diharapkan mencapai hasil terukur yang paling besar di bawah strategi FY2014-2018 dan menetapkan mekanisme untuk mengintegrasikan data dan analisis ke dalam rancangan program, pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran. Komitmen USAID/Indonesia untuk menerapkan siklus program terpadu berdasarkan data dan bukti penelitian akan menghasilkan strategi proaktif dan adaptif yang mempertimbangkan pembelajaran dan merespon perubahan prioritas pembangunan Indonesia sehingga tetap sesuai, efektif, dan terfokus dan akan memaksimalkan dampak pembangunan agar dapat turut serta membentuk stabilitas jangka panjang dan kemakmuran Indonesia.